



SENSUS EKONOMI 2006

Evaluasi Terhadap Kriteria UMK dan UMB

Hasil SE06-SS



SENSUS EKONOMI 2006
Evaluasi Terhadap Kriteria UMK – UMB
Hasil SE06-SS

<http://www.bps.go.id>

Subdirektorat Pengembangan Model Statistik
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

SENSUS EKONOMI 2006

Evaluasi Terhadap Kriteria UMK – UMB

Hasil SE06-SS

ISBN : 978-979-064-137-2

No. Publikasi : 07340.0902

Katalog BPS : 1306032

Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : vi + 71

Naskah:

Subdirektorat Pengembangan Model Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Pengembangan Model Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh:

CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

SENSUS EKONOMI 2006
Evaluasi Terhadap Kriteria UMK – UMB
Hasil SE06-SS

Pengarah : Wiwiek Arumwaty

Editor : Sodikin Baidowi
Agus Marzuki

Penulis : Agus Marzuki
Usman Bustaman
Yuniarti

Pengolahan Data/
Penyiapan Draft : Usman Bustaman

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

KATA PENGANTAR

Sensus Ekonomi 2006 (SE06) merupakan salah satu kegiatan yang merekam seluruh kegiatan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha kecuali sektor pertanian dan sektor pemerintahan. Dalam SE06, unit pencacahan perusahaan/usaha dikelompokkan menjadi dua, yaitu Usaha Menengah Besar (UMB) dan Usaha Mikro Kecil (UMK). Secara umum kriteria pengelompokan didasarkan pada jaringan usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, kriteria sektoral, dan omset.

Penerapan kriteria pengelompokan perusahaan/usaha antar kategori/golongan pokok dapat berbeda dan dapat merupakan kombinasi dari berbagai kriteria tersebut. Oleh karena itu, setelah data diperoleh perlu dievaluasi kesesuaiannya terhadap kriteria UMK/UMB yang telah diterapkan.

Publikasi ini menyajikan evaluasi terhadap kriteria UMK dan UMB yang telah diterapkan tersebut. Evaluasi dilakukan menggunakan analisis statistik, dengan cara melakukan pengelompokan terhadap data SE06 tanpa melihat dalam kelompok mana (UMK atau UMB) suatu perusahaan/usaha diklasifikasikan sebelumnya. Hasil pengelompokan ini kemudian digunakan sebagai pembanding bagi pengelompokan yang telah dilakukan dengan menggunakan kriteria tersebut di atas. Metode analisis yang dipilih adalah metode pengelompokan menggunakan *TwoStep Cluster Analysis*.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Disadari bahwa publikasi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini.

Jakarta, November 2009

Deputi Bidang Neraca dan
Analisis Statistik,

Dr. Slamet Sutomo

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Definisi Kewirausahaan	9
2.2 Konsep definisi Usaha Kecil Menengah (UKM)	11
2.3 Arah Kebijakan Pengembangan UKM di Indonesia	17
2.4 Pendataan Usaha melalui Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel (SE06-SS)	19
2.4.1 Tujuan Pelaksanaan SE06-SS	20
2.4.2 Cakupan Kegiatan SE06-SS	20
2.4.3 Penentuan Kriteria UMK-UMB dalam Kegiatan SE06-SS	21
2.4.3.1 Kriteria Perusahaan Menengah dan Besar	22
2.4.3.2 Kriteria Perusahaan Mikro dan Kecil	23
2.4.4 Kelompok Pencacahan UMB	24
2.4.4.1 Kelompok Pencacahan UMB Berkala	24
2.4.4.2 Kelompok Pencacahan UMB Khusus	25
2.4.4.3 Kelompok Pencacahan UMB Baru	26
2.4.5 Jenis Daftar dan Data yang Dikumpulkan	26
2.4.6 Tahapan Kegiatan Sensus Ekonomi 2006	28

BAB III METODOLOGI	33
3.1 Kerangka Pemikiran	33
3.2 <i>Two Step Cluster Analysis</i>	35
3.2.1 Tahapan Pembentukan Cluster	35
3.2.2 Komposisi Cluster	37
3.2.3 Signifikansi Variabel	38
BAB IV PEMBAHASAN	43
4.1 Kompilasi Data	43
4.2 Pemilihan Variabel	44
4.3 Penyeleksian Data	45
4.3.1 Pengecekan Terhadap Kelengkapan Data	45
4.3.2 Pengecekan Terhadap Kerasionalan Data	46
4.3.3 Reklasifikasi: Pergeseran Klasifikasi Lapangan Usaha	46
4.4 Klasifikasi Usaha Menggunakan Metode Analisis Cluster	49
4.4.1 Pemenuhan Asumsi dan Penyederhanaan Variabel	49
4.4.2 Hasil Pengelompokan.....	52
4.4.3 Karakteristik Data Hasil Pengelompokan	54
4.4.4 Perlukah Pembedaan Kategori Industri dan Non Industri?	55
BAB V KESIMPULAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN 1	65
LAMPIRAN 2	67
LAMPIRAN 3A	68
LAMPIRAN 3B	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cakupan Kedalaman UMK berdasarkan KBLI	24
Tabel 2.2 Pengelompokan Data Kor dan Modul untuk UMK	28
Tabel 2.3 Pengelompokan Data Kor dan Modul untuk UMB	28
Tabel 4.1 Cakupan dan Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Kompilasi Data SE06-SS	44
Tabel 4.2 Variabel Terpilih dan Atribut-atributnya	44
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Filtering Kelengkapan dan Rasionalitas Data	46
Tabel 4.4 Banyaknya Perusahaan Setelah Proses Reklasifikasi Data SE06-SS	47
Tabel 4.5 Banyaknya Unit Analisis Hasil Proses Filtering	49
Tabel 4.6 Korelasi Antar Variabel-variabel Numerik	50
Tabel 4.7 Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan vs Klasifikasi SE06-SS	53
Tabel 4.8 Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan Menurut Karakteristik	54
Tabel 4.9 Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan vs Kategori Usaha	56
Tabel 4.10 Karakteristik Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan Menurut Kategori Usaha Industri dan Non Industri	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Diagram Alir Penentuan Unit Pencacahan UMB dan UMK	22
Gambar 3.1 Diagram Alir Evaluasi Kriteria UMK-UMB Hasil SE06-SS	33
Gambar 4.1 Pergeseran Klasifikasi Usaha yang Terjadi pada Kelompok UMB dan UMK	48
Gambar 4.2 Bagan Korelasi Antar Variabel	51

<http://www.bps.go.id>

BAB 1

Pendahuluan

<http://www.bps-9>

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam pergerakan roda perekonomian. Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu, UKM terbukti memiliki daya tahan dan mampu menjadi penyangga perekonomian bangsa. Salah satu alasan mengapa UKM memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis adalah karena struktur *source of funds* dari UKM sekitar 73 persen berasal dari kalangan sendiri (self-funding), 4 persen (dari Bank Swasta), 11 persen (Bank pemerintah) dan 3 persen (supplier) (Timberg, 1999).

Pengembangan UKM di Indonesia sangat penting untuk dilakukan, mengingat fungsi sosial ekonomi dan politiknya yang strategis. Proporsi UKM di Indonesia berdasarkan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2006 adalah sekitar 99,8 persen, dimana 99,0 persen diantaranya adalah usaha mikro dan usaha kecil. Dengan proporsi ini, UKM memiliki daya serap tenaga kerja yang besar. Berdasarkan SE 2006, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UKM tercatat sekitar 44.706.205 orang. Selain itu kontribusi UKM terhadap PDB pada tahun yang sama juga cukup besar yakni sebesar 53,3 persen (SE 2006).

Melihat besarnya jumlah unit pelaku ekonomi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, maka UKM layak mendapat perhatian. Berkembangnya UKM akan memperkuat struktur ekonomi domestik karena terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan memperbesar tingkat permintaan. Berikutnya, permintaan yang tinggi akan mendorong pertumbuhan investasi.

Meski memiliki peran strategis, mengembangkan UKM bukanlah hal yang mudah. UKM memiliki permasalahan yang cukup kompleks, antara lain; 1) lemah dalam posisi tawar, khususnya terhadap perusahaan besar, 2) kemampuan modal yang minim, (3) rendahnya teknologi, dan (4) lemah dalam manajemen organisasi.

Permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks karena UKM kurang mendapat dukungan dari pemerintah terutama dalam hal kebijakan atau peraturan. Kebijakan dalam penanganan UKM yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, sehingga kebijakan menjadi kurang terarah dan bersifat tambal-sulam. Penanganan UKM dikatakan tambal sulam karena adanya kecenderungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UKM seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil. Padahal seperti kita ketahui bahwa dengan dijalankannya kebijakan yang bersifat tambal-sulam dapat berakibat pada inkonsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UKM pun kurang tercapai secara maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan UKM dengan serius, agar potensinya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu pembenahan utama yang diperlukan adalah dari aspek regulasinya.

Berkenaan dengan aspek regulasi, perlu dilakukan penyamaan persepsi tentang konsep definisi/kriteria UKM. Selama ini masih banyak terdapat perbedaan tentang konsep definisi UKM antar instansi pemerintah, sesuai dengan kepentingan masing-masing lembaga. Adanya berbagai macam penetapan definisi mengenai UKM tentu akan membawa berbagai konsekuensi yang strategis. Konsep definisi merupakan konsensus terhadap entitas UKM sebagai dasar formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak, ada dua tujuan adanya konsep definisi yang jelas mengenai UKM, yaitu pertama, untuk tujuan administratif; serta kedua, tujuan yang berkaitan dengan pembinaan (*German Agency For Technical Cooperation, 2002*).

Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UKM.

Meskipun perbedaan-perbedaan ini bisa dipahami dari sisi tujuan masing-masing lembaga, namun kalangan yang terlibat dengan kelompok UKM seperti pembuat kebijakan, konsultan, dan para pengambil keputusan akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti halnya, kesulitan dalam mendata yang akurat dan konsisten, mengukur sumbangan UKM bagi perekonomian, dan merancang regulasi/kebijakan yang fokus dan terarah.

Oleh karena itu, upaya untuk membuat kriteria UKM yang lebih relevan dengan kondisi saat ini dan didukung oleh data yang lengkap tentang UKM seperti Sensus Ekonomi 2006 perlu dilakukan. Untuk itu tulisan ini mencoba menelaah lebih dalam tentang kriteria UKM yang dapat dibuat dari data Sensus Ekonomi 2006. Diharapkan dengan adanya kriteria UKM yang baru, dapat dijadikan acuan bagi seluruh lembaga yang berkepentingan dalam pembinaan UKM, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien.

1.2. Tujuan

Kriteria Usaha pada survei atau sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) selalu dibedakan menjadi empat yaitu: usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Usaha mikro dan kecil dikategorikan menjadi UMK (Usaha Mikro Kecil), sedangkan usaha menengah dan besar dikategorikan menjadi UMB (Usaha Menengah Besar). Salah satu tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah lebih dalam tentang kriteria UMK-UMB berdasarkan data Sensus Ekonomi 2006.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini difokuskan pada evaluasi kriteria UMK-UMB yang digunakan oleh BPS serta simulasi pembuatan beberapa kriteria UMK-UMB yang baru berdasarkan data Sensus Ekonomi 2006. Penentuan kriteria yang baru dalam tulisan ini mempunyai dua pengertian yaitu: 1) menggunakan klasifikasi UMK-UMB yang lama namun definisi di dalamnya berbeda, atau 2) membuat klasifikasi UMK-UMB yang baru dengan merujuk dari beberapa konsep definisi yang sudah ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima (5) bab, dimana pada Bab I dijelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup dan tujuan dari penulisan. Pada Bab II dijelaskan tentang konsep definisi UKM dan beberapa artikel tentang UKM yang dapat menggambarkan lebih rinci mengenai UKM dan permasalahannya. Pada Bab III dijelaskan tentang metodologi penulisan mulai dari sumber data dan beberapa teknik statistik yang digunakan dalam penulisan. Pada Bab IV dijelaskan tentang hasil pembahasan yang terdiri dari gambaran umum UKM di Indonesia, konsistensi data dan hasil simulasi pembuatan kriteria UMK-UMB. Sedangkan pada bab V dijelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini.

BAB 2

Kajian Pustaka

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Definisi Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan elemen penting di dalam manajemen usaha kecil dan menengah. Di Amerika Serikat misalnya, kewirausahaan seringkali diartikan sebagai seseorang yang memulai bisnis baru, kecil dan milik sendiri (Drucker, 1985:1). Kata “wirausaha” atau wiraswasta” dalam bahasa Indonesia adalah padanan kata bahasa Perancis *entrepreneur*, yang sudah dikenal sejak abad 17 (Holt, 1992 dalam Riyanti, 2003:21). Kata *entrepreneur* diturunkan dari kata kerja *entreprendre*. The Concise Oxford French Dictionary (1980) dalam Riyanti (2003:21) mengartikan *entreprendre* sebagai *to undertake* (menjalankan, melakukan, berusaha), *to set about* (memulai), *to begin* (memulai); *to attempt* (mencoba, berusaha). Kata “wirausaha merupakan gabungan kata wira (=gagah berani, perkasa) dan usaha. Jadi, wirausaha berarti orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha. Kata “wiraswasta” terdiri dari kata wira (=gagah berani, perkasa) dan swa (=sendiri, mandiri). Jadi, wiraswasta berarti orang yang perkasa dan mandiri. Harus diakui memberikan definisi realis dari wirausaha tidak semudah semudah memformulasi definisi etimologisnya. Dalam berbagai referensi kita menemukan rumusan yang dikemukakan para pakar manajemen tentang wirausaha atau *entrepreneur*.

Menurut Zimmerer dan Schorborough (1998) dalam Riyanti (2003:22) menyebutkan sebagai berikut:

“an entrepreneur is one who creates a new business in face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resource to capitalize on them.”

Peter dan Hisrich (1998:9) juga mengemukakan pendapat yang hampir senada, yaitu : “*entrepreneurship is process of creating something new with value by devoting the necessary time and effort, asuming the accompanying financial, physic and social risk, and receiving the resultingrewards of monetary and personal satisfactin and independence.*””

Stevenson (1999) berpendapat bahwa *entrepreneurship* merupakan sinonim dari “*bearing risk*” (= menanggung resiko), inovasi atau pembentukan suatu usaha.

Meredith (2002) berpendapat bahwa para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996) dalam Riyanti (2003:24) mengartikan wirausaha sebagai :

“orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya.”

Dari berbagai pengertian tersebut tentang wirausaha dapat kita tarik suatu kesimpulan (Riyanti, 2003:25), sebagai berikut :

“Wirausaha adalah orang yang menciptakan kerja bagi orang lain dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri dengan bersedia mengambil resiko pribadi dalam menemukan peluang berusaha dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi dirinya untuk mengenali produk, mengelola dan menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk, memasarkannnya serta permodalan operasinya.”

2.2. Konsep definisi Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kewirausahaan sangat identik dengan usaha kecil. Tidak banyak buku yang membahas tentang pengertian tentang usaha kecil dan menengah, karena belum ada batasan dan kriteria yang baku mengenai usaha kecil dan menengah. Wheelen dan Hunger (2002) berpendapat bahwa usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara independen, tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif. Tapi usaha yang bersifat kewirausahaan adalah usaha yang pada awalnya bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikan dengan praktek-pratek inovasi strategis.

Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam. Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM) menurut Griffin dan Ebert (1996) memiliki tiga peran penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai pencipta lapangan kerja, sumber inovasi dan pendukung usaha besar. Kenyataan di berbagai negara menunjukkan banyaknya lapangan kerja baru justru diciptakan oleh UKM.

Meski UKM memiliki peranan penting di setiap negara, namun tidak mudah menemukan rumusan definitif yang bisa disepakati bersama mengenai UKM ini. Usaha kecil dan menengah di berbagai negara memiliki definisi yang berbeda-beda, baik dari segi ukuran maupun kriterianya (Hashim dan Wafa, 2002). Menurut Bank Dunia (1978) dalam Mulhern (1995), UKM adalah usaha yang melibatkan tenaga kerja antara 5-199 orang. Sementara European Commission, sebagaimana disampaikan oleh Mulhern (1995) mendefinisikan UKM sebagai perusahaan yang memiliki pekerja di bawah 250 orang.

Definisi UKM di beberapa negara Asia yang berhasil dikompilasi oleh Lee, Lim dan Tan (2002) adalah sebagai berikut :

- **Brunei** : UKM adalah perusahaan yang memiliki pekerja kurang dari 100 orang

- **Hongkong:** (1) pada industri manufaktur, UKM adalah usaha dengan pekerja kurang dari 100 orang, (2) pada industri non manufaktur, UKM adalah usaha dengan pekerja kurang dari 50 orang
- **Jepang:** (1) untuk industri manufaktur, transportasi dan konstruksi, UKM adalah usaha yang memiliki pekerja kurang dari 300 orang dan memiliki modal investasi kurang dari 100 juta yen, (2) untuk industri perdagangan umum, UKM adalah usaha yang memiliki pekerja kurang dari 100 orang dan mempunyai modal investasi kurang dari 30 juta yen, (3) untuk industri retail dan jasa, pekerja UKM kurang dari 50 orang dan memiliki modal investasi kurang dari 10 juta yen
- **Malaysia:** UKM adalah perusahaan yang memiliki pekerja penuh waktu kurang dari 75 orang dan dana dibawah 25 juta RM
- **Philipina:** (1) usaha kecil memiliki pekerja 10 sampai 99 orang dan total asset sebesar 1,5 juta peso (2) usaha menengah memiliki pekerja 100 orang-199 orang dan memiliki total asset sebesar 60 juta peso
- **Korea:** (1) untuk industri manufaktur dan transportasi memiliki pekerja kurang dari 300 orang, (2) untuk perusahaan konstruksi, UKM memiliki pekerja tidak lebih dari 200.

Sementara konsep definisi UKM menurut lembaga-lembaga internasional adalah:

1. World Bank, membagi UKM ke dalam tiga jenis, yaitu:

- Medium enterprise, dengan kriteria: a) jumlah karyawan maksimal 300 orang, b) pendapatan setahun hingga sejumlah US\$ 15 juta, dan c) jumlah aset hingga sejumlah US\$15 juta.
- Small enterprise, dengan kriteria: a) jumlah karyawan kurang dari 30 orang, b) pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 3 juta, dan c) jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
- Micro enterprise, dengan kriteria: a) jumlah karyawan kurang dari 10 orang, b) pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 100 ribu, dan c) jumlah aset tidak melebihi US\$ 100 ribu.

2. Europa Commission, membagi UKM ke dalam tiga jenis, yaitu:

- Medium-sized enterprise, dengan kriteria: a) jumlah karyawan kurang dari 250 orang, b) pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 50 juta, dan c) jumlah aset tidak melebihi US\$ 43 juta.
- Small-sized enterprise, dengan kriteria: a) jumlah karyawan kurang dari 50 orang, (b) pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 10 juta, dan c) jumlah aset tidak melebihi US\$ 13 juta.
- Micro-sized enterprise, dengan kriteria: a) jumlah karyawan kurang dari US\$ 10 juta orang, b) pendapatan setahun tidak melebihi US\$ 2 juta, dan c) jumlah aset tidak melebihi US\$ 2 juta.

Di samping itu, usaha tersebut harus memenuhi kriteria independensi. Usaha yang independen berarti usaha yang modal atau hak votingnya sebesar 25 persen atau lebih baik dimiliki oleh satu perusahaan atau beberapa perusahaan secara bersama-sama.

Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat beragam. Sebelum dikeluarkannya UU No.9/1995, setidaknya ada lima instansi yang merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing. Kelima instansi itu adalah Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

BPS membedakan definisi UKM berdasarkan sektor industri dan non industri. UKM pada sektor industri didasarkan pada tenaga kerja, dimana disebut usaha mikro jika memiliki tenaga kerja 1-4 orang, usaha kecil (5-19 orang), usaha menengah (20-99 orang) dan usaha besar (100 orang ke atas). Sedangkan UKM pada sektor non industri didasarkan pada omset, dengan kriteria usaha mikro (< 50 juta), usaha kecil (50 juta – 1 milyar), usaha menengah (1-3 milyar), dan usaha besar (> 3 milyar).

Departemen Perindustrian melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/1989 dan Bank Indonesia, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai

asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunannya), bernilai kurang dari Rp 600 juta.

Departemen Perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya. Menurut Departemen Perdagangan, usaha kecil adalah usaha (dagang) yang modal kerjanya bernilai kurang dari Rp 25 juta.

Sedangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian dan industri. Kelompok kedua adalah bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin yang dimaksud dengan usaha kecil untuk kelompok pertama adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 600 juta. Adapun untuk kelompok kedua yang dimaksud dengan usaha kecil adalah yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 250 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 1 milyar.

Berdasarkan pada kelima batasan tersebut dapat diketahui betapa sangat beragamnya pengertian usaha kecil yang kini berlaku di Indonesia. Padahal di luar kelima pengertian tersebut, kini juga terdapat pengertian usaha kecil sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang No.9/1995. Menurut Undang-Undang ini, yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 butir 1 yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;

- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5).

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan
3. Bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah. Dalam kenyataannya, praktek industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:

1. Industri kerajinan rumah tangga (*cottage or household industry*) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (*establishment*) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labour*). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar lokal dan menggunakan teknologi tradisional.

2. Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarki antara para pekerja.
3. Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di golongkan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang berorientasi pada teknologi modern.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, konsep definisi UKM adalah:

(1) **Kriteria Usaha Mikro** adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) **Kriteria Usaha Kecil** adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) **Kriteria Usaha Menengah** adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu :

1. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha;
2. Struktur organisasi bersifat sederhana;
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar;
4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan;
5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya;
6. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas;
7. Margin keuntungan sangat tipis.

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya.

2.3. Arah Kebijakan Pengembangan UKM di Indonesia

Arah kebijakan pengembangan UKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004. Pedoman kebijakan negara ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional untuk periode 1999-2004. Kerangka kerja kebijakan terdiri dari tiga kebijakan utama (Menekop & UKM, 2000 dalam Tambunan, 2002:126), yaitu :

1. Sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Sistem ini menjamin kesempatan-kesempatan bisnis dan kesempatan kerja yang sama, perlindungan konsumen dan perlakuan yang adil terhadap masyarakat. Di bawah prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Usaha-usaha mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dapat ditunjukkan dengan : a) adanya suatu sistem persaingan adil yang menjamin kesempatan bisnis dan kerja yang sama; b) peranan pemerintah yang efektif dalam menyempurnakan sistem pasar termasuk pengurangan pajak; c) kebijakan ekonomi yang menciptakan kesempatan berusaha bagi UKM; d) suatu pertumbuhan kemitraan usaha antar pengusaha UKM; e) meningkatkan penerimaan positif dari masyarakat dalam bisnis dan peningkatan dalam penerimaan dari masyarakat.

2. Penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan UKM sehingga menjadi efisien, produktif dan kompetitif. 25 Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil dimana UKM bisa mendapat keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dengan pemain-pemain bisnis lainnya. Pada dasarnya, kebijakan ini sejalan dengan kebijakan-kebijaksanaan lainnya dari ekonomi makro, sektoral, dan pembangunan daerah/lokal, yang secara bersama-sama memberikan dukungan komplementer untuk meningkatkan bisnis UKM.
3. Kebijakan peningkatan kapasitas UKM yang bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi UKM, seperti keterbatasan modal, pasar dan input-input untuk berproduksi, kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian-keahlian teknis, bisnis, teknologi dan keterbatasan akses informasi dan mitra usaha. GBHN 1999 menekankan bahwa dukungan dari pemerintah terhadap penguatan UKM harus dilaksanakan secara selektif dalam bentuk perlindungan terhadap persaingan yang tidak adil, pengembangan SDM lewat pendidikan dan pelatihan, diseminasi informasi mengenai bisnis dan teknologi, penyediaan finansial, lokasi usaha dan kemitraan usaha dengan BUMN

dan perusahaan-perusahaan besar swasta, penyediaan fasilitas-fasilitas untuk agribisnis, industri kecil, industri rumah tangga, penyempurnaan dari pembangunan kapasitas dari lembaga-lembaga lokal dan utilisasi sumber daya alam.

Namun demikian, dalam realitas, kebijaksanaan UKM masih berorientasi kepada sosial daripada pasar atau persaingan. Kebijaksanaan UKM belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijaksanaan ekonomi secara umum/makro di Indonesia. Konsekuensinya, kebijaksanaan UKM di Indonesia belum berfungsi sebagai elemen-elemen komplemen dan sektoral dari kebijaksanaan ekonomi seperti yang diharapkan.

2.4 Pendataan Usaha melalui Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel (SE06-SS)

Sensus Ekonomi 2006 (SE06) sangat penting arti dan peranannya dalam rangka mengidentifikasi populasi, memperbaharui direktori dan kerangka sampel serta membuat peta persebaran usaha di Indonesia.

SE06 diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik seluruh kegiatan ekonomi di luar kegiatan sektor pertanian. Pendekatan pencacahan dalam SE06 dilakukan melalui pendekatan usaha. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha berskala besar, menengah, kecil dan mikro.

Pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan listing SE06 terhadap seluruh perusahaan/ usaha di luar sektor pertanian yang pencacahannya menggunakan dua jenis kuesioner, yaitu SE06-L1 (untuk perusahaan/usaha yang berlokasi non permanen) dan SE06-L2 (untuk perusahaan/usaha yang berlokasi permanen). Pada tahun 2007 telah dilaksanakan Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel (SE06-SS) yang merupakan kelanjutan dari kegiatan SE06. Dalam kegiatan ini dicacah secara rinci seluruh perusahaan/usaha berskala menengah dan besar (UMB) serta secara sampel perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil (UMK).

Dari hasil kegiatan SE06-SS ini diharapkan dapat diperoleh data rinci mengenai

struktur pendapatan dan pengeluaran, struktur permodalan, serta berbagai karakteristik usaha lainnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan propinsi.

2.4.1 Tujuan Pelaksanaan SE06-SS

Tujuan SE06-SS secara umum adalah mengumpulkan dan menyajikan data dasar yang lengkap, rinci dan *up to date* tentang kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia yang mencakup jumlah, karakteristik usaha dan kegiatan dari semua skala perusahaan/usaha yang bergerak di berbagai lapangan usaha di luar usaha pertanian (dilakukan pengumpulan data tersendiri).

Secara khusus, tujuan SE06-SS adalah:

- a. Memperoleh data rinci perusahaan/usaha UMK, serta perusahaan /usaha UMB sebagai bahan perencanaan dan analisis baik mikro maupun makro kegiatan ekonomi di Indonesia di luar sektor pertanian.
- b. Memperoleh *benchmark* dan basis data untuk berbagai survei lanjutan di bidang ekonomi sampai dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi berikutnya.
- c. Memperoleh informasi dasar tentang berbagai usaha di Indonesia menurut sektor, aktivitas, skala usaha dan wilayah, diantaranya meliputi:
 - Jumlah perusahaan/usaha
 - Penyerapan tenaga kerja
 - Pengeluaran untuk tenaga kerja
 - Struktur input dan struktur output
 - Struktur permodalan
 - Kendala dan prospek usaha

2.4.2 Cakupan Kegiatan SE06-SS

Kegiatan usaha yang dicakup dalam SE06-SS ini meliputi seluruh lapangan

usaha kecuali sektor pertanian (kategori A dan B) dan sektor pemerintahan (kategori L) menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang merujuk kepada ISIC revisi 3.1.

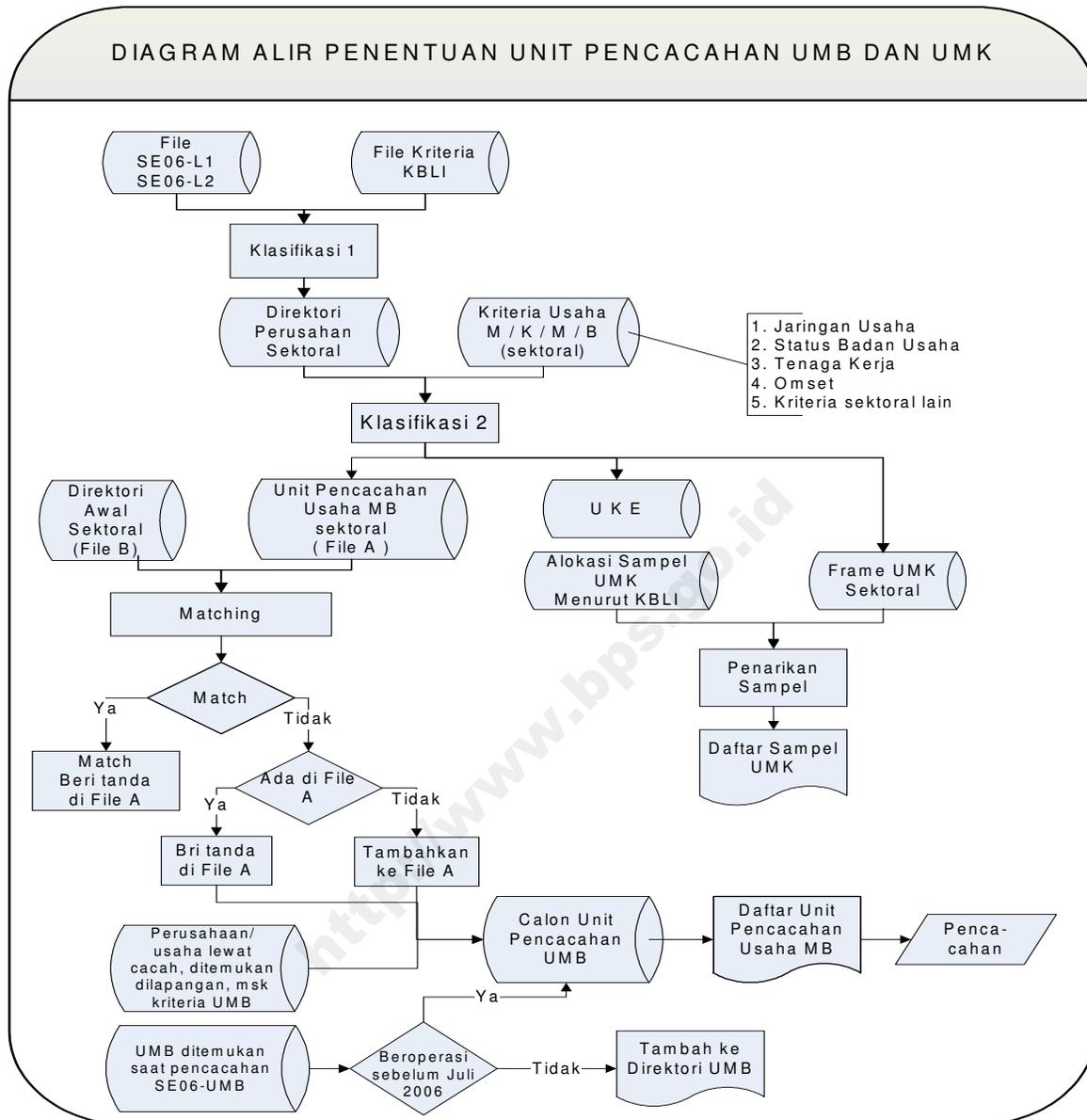
Secara rinci seluruh sektor yang dicakup dalam SE06-SS adalah:

1. Pertambangan dan penggalian (kategori C)
2. Industri pengolahan (kategori D)
3. Listrik, gas dan air (kategori E)
4. Konstruksi (kategori F)
5. Perdagangan besar dan eceran (Kategori G)
6. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kategori H)
7. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi (kategori I)
8. Perantara keuangan (kategori J)
9. Real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (kategori K)
10. Jasa pendidikan (kategori M)
11. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (kategori N)
12. Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya, kecuali untuk: organisasi buruh, organisasi keagamaan, dan organisasi politik (kategori O)
13. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga (kategori P)

2.4.3 Penentuan Kriteria UMK-UMB dalam Kegiatan SE06-SS

Dalam SE06, unit pencacahan perusahaan/usaha dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan menengah dan perusahaan besar (UMB), dan usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Secara umum kriteria pengelompokan perusahaan/usaha didasarkan pada jaringan usaha (tunggal, kantor pusat/induk, dan cabang), status badan usaha, jumlah tenaga kerja, kriteria sektoral lain, dan omset. Penerapan kriteria pengelompokan perusahaan/usaha antar kategori/golongan pokok dapat berbeda dan dapat merupakan kombinasi dari berbagai kriteria tersebut. Proses klasifikasi UMB dan UMK seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Diagram Alir Penentuan Unit Pencacahan UMB dan UMK



2.4.3.1 Kriteria Perusahaan Menengah dan Besar

Cakupan perusahaan/usaha menengah dan besar (UMB) ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan suatu perusahaan/usaha masuk ke dalam kategori perusahaan/usaha menengah dan besar dilakukan dengan tahapan:

1. Kriteria *subject matter* (SM). Yaitu perusahaan/usaha dikategorikan sebagai UMB jika memenuhi kriteria:

- i. KBLI
- ii. Badan Usaha
- iii. Jaringan Usaha
- iv. Jumlah Tenaga Kerja
- v. Kriteria sektoral lainnya

Kriteria tersebut diterapkan untuk menetapkan UMB dari populasi perusahaan/usaha hasil listing SE06. Kriteria *subject matter* secara rinci tercantum pada Lampiran 1.

2. *Threshold* undang-undang, yaitu perusahaan/usaha dikategorikan sebagai UMB apabila nilai omset ≥ 1 miliar rupiah sesuai dengan batas minimum yang tercantum dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang tentang Usaha Kecil.

Sehingga cakupan unit pencacahan UMB adalah:

1. Perusahaan/usaha hasil listing SE06 yang memenuhi kriteria SM baik dari SE06-L1 maupun SE06-L2.
2. Perusahaan/usaha hasil listing SE06-L1 maupun SE06-L2 yang tidak memenuhi kriteria SM, tetapi memiliki omset ≥ 1 miliar rupiah.
3. Perusahaan/usaha lewat cacah yang diusulkan oleh BPS Propinsi maupun SM.
4. Perusahaan/usaha menengah dan besar yang ditemukan pada saat pencacahan SE06-UMB dan beroperasi secara komersial sebelum pendaftaran SE06 (sebelum Juli 2006)

2.4.3.2 Kriteria Perusahaan Mikro dan Kecil

Perusahaan/usaha mikro dan kecil (UMK) yang dicakup dalam SE06-SS adalah merupakan komplemen dari UMB dengan terlebih dahulu memisahkan Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang bukan merupakan unit pencacahan. Cakupan kedalaman berdasarkan KBLI yang telah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Cakupan Kedalaman UMK berdasarkan KBLI

Kategori	2 digit	3 digit	4 digit	5 digit
C	√			
D	√			
E			√	
F			√	
G	√	√ ^{*)}	√	√ ^{*)}
H			√	√
I		√		√
J				√
K	√			√ ^{*)}
M		√		√ ^{*)}
N		√	√	√ ^{*)}
O	√		√ ^{*)}	√ ^{*)}
P				√

*) Gabungan

2.4.4 Kelompok Pencacahan UMB

Jumlah UMB yang dilakukan secara sensus sebesar \pm 190 ribu yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok pencacahan, yaitu pencacahan berkala, baru, dan khusus. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mempermudah pembagian tugas.

Pencacahan perusahaan UMB dilakukan dengan pendekatan *establishment* dan dibedakan dalam 3 (tiga) daftar perusahaannya dengan pencacahan sebagai berikut:

2.4.4.1 Kelompok Pencacahan UMB Berkala

Perusahaan UMB yang termasuk dalam kelompok pencacahan UMB berkala adalah perusahaan-perusahaan yang datanya selama ini telah dikumpulkan secara berkala. Kelompok ini meliputi Perusahaan/Unit Produksi/Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan/Unit Eksplorasi Pertambangan Non Migas, Perusahaan Pengilangan

Minyak dan Gas, UPPDN/Cabang/Depot/DPPU, Kantor Pusat perusahaan pertambangan migas dan non migas, Perusahaan Penggalian Golongan C, Industri Pengolahan, Perusahaan Listrik PLN, Perusahaan Gas Kota, Perusahaan Air Bersih, Perusahaan Konstruksi, Perusahaan Hotel dan Akomodasi Lainnya, Perusahaan Perbankan, Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura, Jasa Penunjang Pasar Modal, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Perusahaan Jasa Penukaran Mata Uang.

Petugas pengumpul data yang mencacah UMB berkala adalah staf BPS Propinsi/Kabupaten/Kota/KSK dan diutamakan petugas yang biasa menangani/mencacah perusahaan yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi antara wawancara dan *self enumeration*, artinya petugas pengumpul data melakukan wawancara untuk rincian-rincian pertanyaan yang memungkinkan datanya dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan untuk rincian-rincian pertanyaan lain yang pengisiannya memerlukan waktu yang lama, diserahkan kepada responden. Sebelum menyerahkan kuesioner, petugas harus menjelaskan tata cara pengisian, dan konsep definisi yang digunakan kepada *contact person*.

2.4.4.2 Kelompok Pencacahan UMB Khusus

Perusahaan yang termasuk kelompok pencacahan UMB khusus adalah perusahaan menengah dan besar yang secara spesifik perlu dicacah melalui pendekatan khusus. Kelompok pencacahan khusus meliputi: Perusahaan Angkutan Kereta Api, Perusahaan ASDP, Perusahaan Penerbangan, Perusahaan Jasa Pelayanan Kepelabuhan Air, Perusahaan Jasa Pelayanan Kebandarudaraan, Perusahaan Jasa Jalan Tol, Perusahaan Pos Nasional, Perusahaan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi.

Petugas pengumpul data yang menangani kelompok pencacahan khusus adalah *Subject Matter* BPS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *self enumeration*. Dokumen akan dikirimkan ke Kantor Pusat perusahaan bersangkutan, dan kemudian Kantor Pusat akan mendistribusikan ke cabang-cabangnya. BPS Kabupaten/Kota bertugas untuk memonitor apakah kuesioner sudah diterima atau belum, dan penyelesaian pengisian dokumen sudah selesai atau belum.

2.4.4.3 Kelompok Pencacahan UMB Baru

Kelompok pencacahan UMB baru adalah perusahaan yang tidak dicacah dalam berbagai survei yang dilakukan oleh BPS, dan baru dalam kegiatan SE06 ini akan dilakukan pendataan secara lengkap

Kelompok pencacahan UMB baru meliputi : Perusahaan Listrik Non PLN, Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Perusahaan Restoran/Rumah Makan, Perusahaan Transporasi, Perusahaan Jasa Penunjang Angkutan, Perusahaan Jasa Kurir, Wartel, dan Warnet, Perusahaan Jasa Perjalanan Wisata, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Real Estat, Perusahaan Jasa Persewaan, Perusahaan Jasa Komputer, Perusahaan Litbang dan Jasa Perusahaan Lainnya, Jasa Pendidikan Dasar, Menengah dan Non formal, Jasa Pendidikan Tinggi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Kebersihan, Kegiatan Organisasi, dan Kegiatan Lainnya, Perusahaan Kawasan Pariwisata, Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Hiburan.

Petugas pengumpul data yang menangani kelompok pencacahan baru adalah staf BPS Propinsi/Kabupaten/Kota/KSK, bila tidak memungkinkan bisa menggunakan Mitra Statistik Binaan yang sudah biasa melakukan survei/sensus yang diadakan oleh BPS.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi antara wawancara dan *self enumeration*, artinya petugas pengumpul data melakukan wawancara untuk item-item pertanyaan yang memungkinkan datanya dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan untuk item-item pertanyaan lain pengisiannya memerlukan waktu yang lama diserahkan kepada responden. Sebelum menyerahkan kuesioner, petugas harus menjelaskan tata cara pengisian, dan konsep definisi yang digunakan kepada *contact person*.

2.4.5 Jenis Daftar dan Data yang Dikumpulkan

Data dan informasi UMK yang dikumpulkan dalam SE06-SS dikelompokkan dalam 3 jenis daftar berdasarkan karakteristik sektor/kategori lapangan usaha, yaitu: kelompok produksi (SE06-UMK PRODUKSI), distribusi (SE06-UMK DISTRIBUSI), dan jasa-jasa (SE06-UMK JASA-JASA).

Adapun pengelompokan sektor/kategori tersebut adalah:

a. SE06-UMK PRODUKSI

1. Pertambangan dan Penggalian (kategori C)
2. Industri Pengolahan (kategori D)
3. Listrik Non PLN (kategori E, KBLI: 4010.)
4. Air Bersih Non PDAM (kategori E, KBLI: 4100.)
5. Konstruksi (kategori F)

b. SE06-UMK DISTRIBUSI

1. Perdagangan (kategori G)
2. Penyediaan Makan/Minum, Bar dan Jasa Boga (kategori H)
3. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (kategori I)

c. SE06-UMK JASA-JASA

1. Lembaga Keuangan (kategori J)
2. Real estat, Persewaan dan Jasa Perusahaan (kategori K)
3. Jasa Pendidikan (kategori M)
4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (kategori N)
5. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya, dan Perorangan Lainnya (kategori O)
6. Jasa yang melayani Rumah Tangga (kategori P)

Perusahaan/usaha menengah dan besar (UMB) pencacahannya menggunakan kuesioner SE06-UMB. Kuesioner yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam sesuai dengan pengelompokan yaitu: Kelompok UMB Baru, UMB Berkala dan UMB Khusus.

Data yang dikumpulkan juga dibagi menjadi 2 jenis data: Pertama, data **kor** adalah jenis data yang ragamnya sama untuk ketiga kelompok tersebut di atas, dan kedua data **modul** yaitu data yang ragamnya berbeda antara kuesioner SE06-UMB. Pengelompokan data kor dan modul untuk masing-masing klasifikasi UMK dan UMB diperlihatkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Pengelompokan Data Kor dan Modul untuk UMK

BLOK	KELOMPOK DATA	JENIS DATA	
		KOR	MODUL
I	Pengenalan Tempat	V	-
II.1	Keterangan Umum	V	-
II.2	Keterangan Khusus Sebulan yang Lalu	-	V
III	Pekerja, Hari Kerja, Jam Kerja, dan Balas Jasa Pekerja	V	-
IV	Biaya/Pengeluaran Usaha Selama Sebulan yang Lalu	V	-
V	Pendapatan Selama Sebulan yang Lalu	-	V
VI	Ringkasan (<i>diisi oleh Pengawas</i>)	V	-
VII	Permodalan	V	-
VIII	Kendala dan Prospek Usaha	V	-
IX	Catatan	V	-
X	Pengesahan	V	-
XI	Keterangan Petugas	V	-

Tabel 2.3 Pengelompokan Data Kor dan Modul untuk UMB

BLOK	KELOMPOK DATA	JENIS DATA	
		KOR	MODUL
I	Pengenalan Tempat	V	-
II.1	Keterangan Umum	V	-
II.2	Keterangan Khusus	-	V
III	Pekerja, dan Balas Jasa pekerja	V	-
IV.1	Biaya/ Pengeluaran Umum Selama Tahun 2006	V	-
IV.2	Biaya/Pengeluaran Khusus Selama Tahun 2006	-	V
V	Pendapatan Selama Tahun 2006	-	V
VI	Ringkasan (<i>diisi oleh Pengawas</i>)	V	-
VII	Neraca Perusahaan	V	-
VIII	Investasi, Kendala dan Prospek Usaha	V	-
IX	Catatan	V	-
X	Pengesahan	V	-
XI	Keterangan Petugas	V	-

Jenis dan daftar kuesioner yang digunakan dalam pelaksanaan SE06-SS diperlihatkan dalam Lampiran 1.

2.4.6 Tahapan Kegiatan Sensus Ekonomi 2006

Kegiatan pendataan usaha dalam Sensus Ekonomi 2006 dilakukan dalam dua

tahap selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2006 dan 2007. Kegiatan pendataan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan tahun 2006

Kegiatan SE06 pada tahun 2006 merupakan kegiatan inti yang meliputi kegiatan listing seluruh perusahaan/usaha diseluruh wilayah Indonesia, kecuali usaha pertanian. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Sosialisasi pendaftaran perusahaan/usaha
- b. Pelatihan Innas dan Inda tahap II
- c. Pelatihan petugas lapangan
- d. Pelatihan Innas pengolahan dan petugas pengolahan
- e. Pendaftaran perusahaan/usaha (listing)
- f. Pengolahan cepat jumlah perusahaan
- g. Uji coba kuesioner dan pedoman pencacahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- h. Uji coba kuesioner dan pedoman pencacahan Usaha Besar (UB)
- i. Pencacahan PES (Post Enumeration Survey)
- j. Pengolahan hasil listing

b. Kegiatan tahun 2007

Kegiatan SE06 pada tahun 2007 merupakan kegiatan Sensus Sampel yang merupakan kegiatan lanjutan dari SE06 Listing. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Pencetakan kuesioner dan buku pedoman UMK dan UMB
- b. Pengambilan sampel UMK
- c. Sosialisasi dan diseminasi hasil listing
- d. Pelatihan Innas dan petugas kegiatan UMK dan UMB
- e. Pelaksanaan lapangan kegiatan UMK dan UMB
- f. Pengolahan hasil UMK dan UMB

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

BAB 3

Metodologi

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

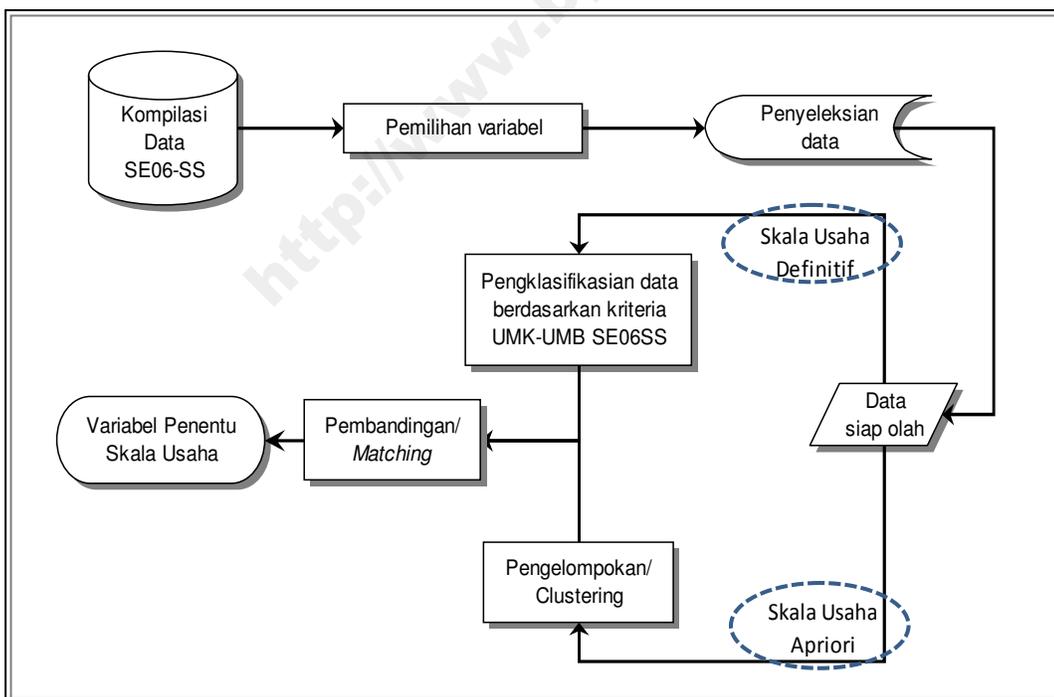
BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka Pemikiran

Analisis terhadap kriteria usaha hasil SE06-SS dilakukan dengan melakukan serangkaian proses seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 4.1. Pada tahap awal dilakukan proses kompilasi data SE06-SS dari seluruh kategori. Proses kompilasi diperlukan karena data yang tersedia sudah terpilah-pilah dengan ragam pertanyaan yang spesifik untuk masing-masing kategori usaha. Melalui proses ini, dapat dihasilkan sebuah *database* SE06-SS dengan variabel-variabel yang sama untuk semua kategori usaha¹.

Gambar 3.1 Diagram Alir Evaluasi Kriteria UMK-UMB Hasil SE06SS



¹ Variabel-variabel ini berasal dari pertanyaan KOR dalam SE06-SS. Pertanyaan KOR menanyakan karakteristik yang sama untuk semua kategori dalam SE06-SS.

Selanjutnya karena variabel yang tersedia dalam *database* tersebut cukup banyak, maka perlu dilakukan pemilihan variabel terutama yang terkait dengan penentuan klasifikasi usaha (Mikro, Kecil, Menengah, atau Besar). Dalam hal ini pemilihan variabel lebih banyak mengacu pada konsep dan definisi yang telah digunakan baik di Indonesia maupun di negara lain. Setelah itu, dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang tersedia di dalam *database* SE06-SS di atas, dipilih beberapa variabel yang akan digunakan dalam analisis.

Meski data yang ada sudah mengalami proses *data entry* dengan menggunakan komputer, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pada proses tersebut baik yang bersifat *human error* (kesalahan pada waktu mengentry data) ataupun kesalahan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya *rule validation* dalam program *data entry*. Oleh karena itu masih diperlukan tahap penyeleksian data hingga diperoleh data yang cukup konsisten (*valid*) untuk keperluan analisis. Secara garis besar proses penyeleksian data terdiri dari proses pengecekan terhadap kelengkapan data, rasionalitas data, dan proses reklasifikasi data.

Dalam pendataan SE06-SS, perusahaan/usaha yang akan didata sudah diklasifikasikan lebih dulu ke dalam kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Usaha Menengah Besar (UMB)². Seperti telah dijelaskan dalam Bab Pendahuluan, salah satu tujuan dari tulisan ini antara lain untuk mengevaluasi pengklasifikasian yang telah dilakukan. Untuk ini dilakukan pengelompokan secara *apriori*³, yakni dengan menganggap bahwa data yang diperoleh berasal dari perusahaan/usaha yang didata tanpa melihat dalam kelompok mana (UMK atau UMB) perusahaan/usaha tersebut diklasifikasikan. Hasil pengelompokan ini kemudian digunakan sebagai pembanding bagi pengklasifikasian yang telah dilakukan. Mengingat pentingnya peran pengelompokan ini, maka metode analisis yang dipilih seyogyanya menghasilkan pengelompokan yang tepat dan mampu mengakomodasi keberadaan variabel numerik dan variabel kategorik sekaligus di dalam modelnya. Metode analisis yang dipilih

² Untuk selanjutnya pengklasifikasian ini disebut sebagai *klasifikasi definitif*.

³ Untuk selanjutnya pengelompokan ini disebut sebagai *klasifikasi apriori*.

adalah *Two Step Cluster* dari SPSS. Penjelasan lebih rinci mengenai metode ini akan dijelaskan dalam Subbab berikut.

3.2 *Two Step Cluster Analysis*

Two step cluster analysis merupakan suatu prosedur yang dirancang untuk mengelompokkan suatu data. Metode ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode tradisional, yaitu:

1. Mampu membuat suatu cluster berdasarkan variabel kategorik maupun kontinu.
2. Mampu melakukan seleksi otomatis terhadap sejumlah *cluster*.
3. Mampu menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien.

Untuk menganalisis variabel kategorik dan numerik (kontinyu), *two step cluster analysis* menggunakan ukuran jarak *log likelihood* yang mengasumsikan variabel dalam model cluster independen. Setiap variabel kontinyu diasumsikan mempunyai distribusi normal (*Gaussian*) sedangkan setiap variabel kategorik diasumsikan mengikuti distribusi multinomial.

3.2.1 Tahapan Pembentukan *Cluster*

Tahapan dalam *two step cluster analysis* adalah sebagai berikut.

Tahap 1: Penyusunan *Precluster*

Pada tahap ini data dikelompokkan dalam subcluster berukuran kecil yang jumlahnya banyak. Data diperiksa kemudian dicatat satu demi satu. Terdapat kemungkinan data akan digabungkan dengan cluster yang sudah terbentuk sebelumnya atau dimasukkan dalam *cluster* baru berdasarkan kriteria jarak *log likelihood*. Jarak *log likelihood* antara cluster *j* dan *s* adalah

$$d(j,s) = \xi_j + \xi_s - \xi_{\langle j,s \rangle}$$

dimana

$$\xi_j = -N_j \left[\sum_{k=1}^{K^A} \frac{1}{2} \log (\hat{\sigma}_k^2 + \hat{\sigma}_{jk}^2) + \sum_{k=1}^{K^B} \hat{E}_{jk} \right]$$

$$\hat{E}_{jk} = - \sum_{l=1}^{L_k} \frac{N_{jkl}}{N_j} \log \frac{N_{jkl}}{N_j}$$

dimana

K^A : jumlah total variabel kontinu yang digunakan,

K^B : jumlah total variabel kategorik yang digunakan,

L_k : jumlah kategori untuk variabel kategorik ke- k ,

N_j : jumlah data yang tercatat pada *cluster* ke- j ,

N_{jkl} : jumlah data yang tercatat pada *cluster* ke- j yang merupakan milik variabel kategorik ke- k yang diambil dari kategori ke- l ,

$\hat{\sigma}_k^2$: estimasi variansi variabel kontinu ke- k untuk seluruh data,

$\hat{\sigma}_{jk}^2$: estimasi variansi variabel kontinu ke- k pada *cluster* ke- j .

Prosedur *two step cluster analysis* dilakukan dengan membangun *cluster feature (CF) tree*. *CF tree* terdiri atas beberapa level *node* dan masing-masing *node* mengandung sejumlah masukan. *Leaf node* beserta masukannya menunjukkan final sub-cluster, sedangkan *non-leaf node* digunakan sebagai petunjuk bagi suatu masukan untuk menemukan *leaf node* yang benar.

Proses dimulai dari *root node*. Kemudian suatu data secara berulang akan dituntun untuk menemukan *node* anakan terdekat dan naik sepanjang *CF tree*. Setelah mencapai *leaf node*, suatu data akan menemukan masukan pada *leaf node* yang terdekat. Jika data memiliki jarak yang masih di dalam ambang terhadap masukan terdekat pada *leaf node*, maka data akan masuk menjadi anggota *node* tersebut dan masukan pada *leaf node* akan diperbarui.

Jika tidak ada ruang untuk masukan baru, maka *leaf node* akan dipecah menjadi 2. Sepasang masukan dengan jarak terjauh sebagai masukan awal, sedangkan sisanya didistribusikan berdasarkan kriteria kedekatan. Jika *CF tree* tumbuh melebihi ukuran maksimum, maka akan dibangun berdasarkan *CF tree* yang telah ada dengan meningkatkan kriteria jarak ambang. *CF tree* yang dihasilkan menjadi lebih kecil sehingga mempunyai ruang untuk masukan baru.

Tahap 2: Pembentukan Cluster

Tahap 2 adalah tahap pengclusteran dari sub-sub *cluster* yang telah dihasilkan pada tahap 1. Maksimum jumlah *cluster* akan ditentukan menggunakan teknik pemilihan jumlah cluster secara otomatis menggunakan *Bayesian Information Criterion* (BIC) atau *Akaike Information Criterion* (AIC). Disamping itu jumlah cluster juga bisa ditentukan sesuai dengan keinginan pengguna.

BIC dan AIC untuk J cluster didefinisikan sebagai berikut.

$$BIC(J) = -2 \sum_{j=1}^J \xi_j + m_j \log(N)$$

$$AIC(J) = -2 \sum_{j=1}^J \xi_j + 2 m_j$$

dimana

$$m_j = J \left\{ 2 K^A + \sum_{k=1}^{K^A} (L_k - 1) \right\}$$

dengan N adalah jumlah total data.

3.2.2 Komposisi Cluster

Komposisi dari masing-masing *cluster* yang terbentuk dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Untuk variabel kategorik, komposisi dari masing-masing cluster yang terbentuk dapat ditampilkan dalam bentuk tabel kontingensi

(*crosstabulations*) atau grafik batang. Sementara untuk variabel numerik, komposisi dari masing-masing *cluster* yang terbentuk dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang menampilkan statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut atau grafik *boxplot*.

3.2.3 Signifikansi Variabel

Ketika suatu data dikelompokkan dengan menggunakan metode analisis cluster, seringkali ingin diketahui seberapa penting suatu variabel berperan dalam membangun cluster yang terbentuk. Dalam hal ini, penghitungan statistik diperlukan untuk mengetahui taraf signifikansi dari masing-masing variabel yang digunakan.

Untuk variabel kategorik, penghitungan statistik *Chi-square* dilakukan untuk membandingkan distribusi dari variabel yang bersangkutan di dalam suatu cluster (*within cluster distribution*) tertentu terhadap distribusi variabel tersebut di dalam data secara keseluruhan (*overall distribution*). Dalam setiap cluster, distribusi dari data observasi dibandingkan dengan distribusi yang diharapkan (*expected distribution*) berdasarkan atas keseluruhan data. Jika nilai harga mutlak dari statistik *Chi-square* tersebut lebih besar dari nilai kritisnya, maka variabel tersebut dinyatakan signifikan dalam membentuk *cluster* yang bersangkutan.

Secara matematis, penghitungan statistik *chi-square* untuk variabel kategorik didefinisikan sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_{l=1}^{L_k} \left(\frac{N_{jkl} - N_{kl}}{N_{kl}} \right)^2$$

Dimana:

N_{jkl} : Jumlah data di dalam cluster ke- j untuk variabel kategorik ke- k pada kategori ke- l

N_{kl} : Jumlah data untuk variabel kategorik ke- k pada kategori ke- l

L_k : Jumlah kategori untuk variabel kategorik ke- k ,

Statistik χ^2 berdistribusi *Chi-square* dengan derajat bebas L_k . SPSS menampilkan statistik ini dalam bentuk grafik batang dimana nilai kritis digambarkan dengan garis putus-putus.

Untuk variabel numerik, dilakukan penghitungan statistik t untuk membandingkan nilai rata-rata dari variabel yang bersangkutan di dalam suatu cluster (*within cluster mean*) tertentu terhadap nilai rata-rata variabel tersebut di dalam data secara keseluruhan (*overall mean*). Jika nilai harga mutlak dari statistik t tersebut lebih besar dari nilai kritisnya, maka variabel tersebut dinyatakan signifikan dalam membentuk *cluster* yang bersangkutan.

Secara matematis, penghitungan statistik t untuk variabel numerik didefinisikan sebagai berikut:

$$t = \frac{\hat{\mu}_k - \hat{\mu}_{jk}}{\hat{\sigma}_{jk} / \sqrt{N_k}}$$

Dimana:

N_k : Jumlah data di dalam cluster ke- k

$\hat{\mu}_k$: Nilai estimasi rata-rata (*estimated mean*) dari variabel numerik ke- k di dalam data secara keseluruhan

$\hat{\mu}_{jk}$: Nilai estimasi rata-rata (*estimated mean*) dari variabel numerik ke- k di dalam cluster ke- j

$\hat{\sigma}_{jk}$: Nilai estimasi standar deviasi (*estimated standard deviation*) dari variabel numerik ke- k di dalam cluster ke- j

Nilai statistik t berdistribusi *Student-t* dengan derajat bebas $N_k - 1$. SPSS menampilkan statistik ini dalam bentuk grafik batang dimana nilai kritis digambarkan dengan garis putus-putus.

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

BAB 4

Pembahasan

<http://www.bk.id>

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara detail tahap-tahap yang telah dilakukan menurut Kerangka Pemikiran dalam Bab Metodologi berikut hasil yang diperoleh.

4.1 Kompilasi Data

Data SE06-SS yang tersedia sudah terpilah-pilah menurut kategori usaha dan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Kelompok UMK mencakup Usaha Mikro dan Kecil, sementara UMB mencakup Usaha Menengah dan Besar. Untuk kategori industri, klasifikasi usaha hanya mengacu pada jumlah tenaga kerja saja, yaitu Usaha Mikro dengan jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang, Usaha Kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang, Usaha Menengah dengan jumlah tenaga kerja 20 – 99 orang, dan Usaha Besar memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. Sementara klasifikasi usaha di luar kategori industri, disamping menggunakan badan hukum dan jaringan usaha juga memperhitungkan jumlah omzet selama setahun, yaitu: Usaha Mikro dengan omzet kurang dari 50 juta rupiah, Usaha Kecil dengan omzet 50 juta hingga 1 milyar rupiah, Usaha Menengah dengan omzet 1 hingga 3 milyar rupiah, dan Usaha Besar dengan omzet diatas 3 milyar.

Proses kompilasi menghimpun data dari semua kategori tersebut ke dalam sebuah *database* dengan variabel-variabel yang sama untuk seluruh kategori. Hasil kompilasi data yang dihimpun dalam tulisan ini meliputi seluruh kategori dengan rincian seperti tertera dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Cakupan dan Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Kompilasi Data SE06-SS

Klasifikasi Usaha	Cakupan *)	Jumlah Perusahaan/Usaha
UMK	Seluruh kategori	1.173.702
UMB	Seluruh kategori, kecuali: - Kategori C (pertambangan dan penggalan), dan - UMB-Khusus.	138.239
Total		1.311.941

Keterangan: *) Kategori-kategori yang dicakup dalam SE06-SS telah dipaparkan dalam Bab II.

4.2 Pemilihan Variabel

Dari sekian banyak variabel yang terdapat dalam *database* SE06-SS, dipilih beberapa variabel yang terkait erat dengan penentuan klasifikasi usaha. Variabel-variabel terpilih beserta atributnya masing-masing disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Variabel Terpilih dan Atribut-atributnya.

Nama Variabel	Tipe	Atribut
Jaringan Perusahaan	Kategorik	1. Tunggal 2. Kantor pusat/induk 3. Cabang 4. Perwakilan 5. Unit pembantu
Bentuk Badan Hukum	Kategorik	0. Perorangan/Tidak Berbadan Hukum 1. PT/PT(Persero)/Perum 2. Koperasi 3. CV 4. Firma 5. BHMN 6. Yayasan 7. Perwakilan Perusahaan Asing 8. Ijin/ijin Khusus dari Instansi Terkait 9. Badan Hukum Lainnya
Jumlah Tenaga Kerja	Numerik	–
Balas Jasa Tenaga Kerja	Numerik	–
Total Pendapatan/Omzet	Numerik	–
Total Pengeluaran/Biaya	Numerik	–
Modal/Aset	Numerik	–

4.3 Penyeleksian Data

Proses Penyeleksian Data (*filtering*) dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam rangka mengevaluasi kriteria UMK/UMB yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan SE06-SS, *filtering* dilakukan sedemikian sehingga data yang diperoleh memenuhi konsep dan definisi yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan SE06-SS. Dengan kata lain, proses *filtering* mengeliminasi data perusahaan/usaha yang mengandung ketidakwajaran terkait dengan isian dari variabel-variabel terpilih. Data perusahaan/usaha yang tereliminasi dikatakan sebagai data yang *invalid* dan tidak diikutsertakan dalam analisis, sementara data perusahaan/usaha yang tidak tereliminasi dalam proses *filtering* merupakan data yang *valid* dan digunakan dalam analisis. Secara garis besar, proses *filtering* dilakukan sebagai berikut:

4.3.1 Pengecekan Terhadap Kelengkapan Data.

Pengecekan terhadap kelengkapan data meliputi pengecekan terhadap isian variabel yang *blank* (tidak terisi) dan yang bernilai nol. Pada dasarnya pengecekan ini mengindikasikan permasalahan yang sama: bahwa pertanyaan di dalam kuesioner tidak berhasil terjawab. Penyebabnya boleh jadi karena petugas tidak berhasil mengoreksi keterangan dari responden atau dari pihak responden yang tidak memberikan keterangan terhadap pertanyaan yang diajukan. Isian *blank* pada umumnya terdapat pada pertanyaan yang sifatnya pilihan (variabel kategorik) seperti pertanyaan tentang jaringan perusahaan dan bentuk badan hukum. Sementara isian nol lebih banyak terdapat pada pertanyaan mengenai nilai/angka (variabel numerik), seperti pertanyaan mengenai pendapatan, pengeluaran dan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan/usaha. Untuk keperluan analisis, data yang diperoleh dari setiap perusahaan/usaha terhadap variabel-variabel terpilih tidak boleh mengandung nilai nol⁴ atau *blank*.

⁴ Kecuali jika perusahaan/usaha yang bersangkutan menggunakan jasa tenaga kerja tidak dibayar, maka untuk variabel Balas Jasa Tenaga Kerja masih memungkinkan memuat nilai nol.

4.3.2 Pengecekan Terhadap Kerasionalan Data

Pengecekan terhadap kerasionalan data meliputi beberapa hal terkait kewajaran isian dari variabel-variabel terpilih dan konsistensi data antar variabel terpilih. Proses *filtering* pada tahap ini mengeliminasi data dengan muatan sebagai berikut:

- Nilai negatif.
- Nilai Total Balas Jasa Tenaga Kerja melebihi nilai Total Pengeluaran/Biaya.
- Keberadaan Tenaga Kerja Dibayar yang tidak mendapatkan Balas Jasa (Upah/Gaji).
- Total Biaya usaha melebihi Pendapatan (Omzet) usaha.
- Nilai Aset yang *over/under estimate*.

Hasil proses penyeleksian data dengan cara seperti telah diuraikan di atas disajikan dalam tabel di bawah ini⁵:

Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil *Filtering* Kelengkapan dan Rasionalitas Data

Klasifikasi Usaha	Jumlah Perusahaan/Usaha			%
	<i>Invalid</i>	<i>Valid</i>	Jumlah	<i>Invalid</i>
UMB	40.929	97.310	138.239	29,61
UMK	9.704	1.163.998	1.173.702	0,83
Total	50.633	1.261.357	1.311.941	3,86

4.3.3 Reklasifikasi: Pergeseran Klasifikasi Lapangan Usaha

Tujuan dari reklasifikasi adalah untuk menyeleksi perusahaan/usaha mana yang betul-betul memenuhi konsep dan definisi UMK/UMB yang telah ditetapkan dalam pendataan SE06-SS. Hal ini perlu dilakukan karena jeda waktu antara pelaksanaan *listing* perusahaan/usaha SE06 dengan pelaksanaan survei SE06-SS berkisar kurang lebih satu tahun⁶. Mengingat perkembangan perekonomian yang

⁵ Rekapitulasi hasil filtering secara lengkap diperlihatkan dalam Lampiran 2.

⁶ Klasifikasi perusahaan/usaha ke dalam kelompok UMK atau UMB didasarkan atas hasil listing perusahaan/usaha dalam kegiatan SE06 yang dilakukan pada tahun 2006, sementara pelaksanaan pendataan perusahaan/usaha dalam kegiatan SE06-SS dilaksanakan pada tahun 2007. SE06 Listing

begitu dinamis, pergeseran klasifikasi sangatlah mungkin terjadi selama jeda waktu (setahun) tersebut, sebab suatu perusahaan/usaha sudah barang tentu mengalami fluktuasi baik dari sisi omzet maupun penyerapan tenaga kerjanya. Oleh karena itu bisa jadi suatu perusahaan/usaha yang berdasarkan data *listing* SE06 diklasifikasikan ke dalam kelompok UMB, setelah dilakukan pendataan dalam kegiatan SE06-SS omzetnya mengalami penurunan hingga mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diserapnya dan semestinya perusahaan/usaha ini lebih tepat dikelompokkan ke dalam UMK. Begitu juga sebaliknya, suatu perusahaan/usaha dalam kelompok UMK dapat meningkat pesat hingga menghasilkan omzet atau pertambahan jumlah pekerja yang cukup signifikan, sehingga pada waktu pelaksanaan pendataan di tahun berikutnya semestinya lebih tepat jika dimasukkan ke dalam kelompok UMB. Hasil proses reklasifikasi diperlihatkan dalam Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Banyaknya Perusahaan Setelah Proses Reklasifikasi Data SE06-SS^{*)}

Reklasifikasi ^{**)} Perusahaan/Usaha	Klasifikasi Berdasarkan Listing SE06					
	Kategori Industri			Kategori Non Industri		
	UMK	UMB	Jumlah	UMK	UMB	Jumlah
Mikro/Kecil	187.828 94,1 %	0 0,0 %	187.828 94,1 %	969.820 91,4 %	40.684 3,8 %	1.010.504 95,2 %
Menengah/ Besar	280 0,1 %	11.570 5,8 %	11.850 5,9 %	6.070 0,6 %	45.056 4,2 %	51.126 4,8 %
Total	188.108 94,2%	11.570 5,8 %	199.678 100,0 %	975.890 92,0 %	85.740 8,0 %	1.061.630 100,0 %

Keterangan:

- *⁾ Data yang digunakan adalah data yang *valid* setelah proses pengecekan kelengkapan dan kersionalan data.
- **⁾ Reklasifikasi untuk kategori industri mengacu pada jumlah tenaga kerja, sementara untuk kategori non industri mengacu pada jumlah omzet.

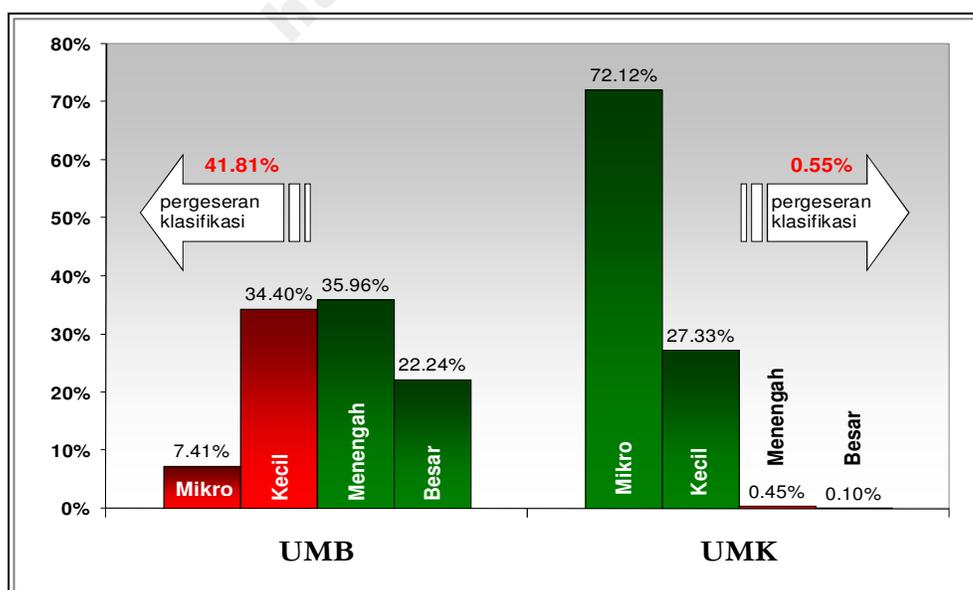
Dari total perusahaan/usaha yang ada di masing-masing kategori, pergeseran klasifikasi pada kategori industri (dari UMK menjadi UMB) hanya terjadi sebesar 0,1% saja, sementara di luar kategori industri pergeseran klasifikasi (baik dari UMK ke UMB maupun dari UMB ke UMK) terjadi sebesar 4,4%. Dengan demikian, selama

menggunakan referensi waktu tahun 2005, sementara SE06-SS menggunakan referensi waktu tahun 2006.

kurun waktu setahun telah terjadi pergeseran klasifikasi sebesar 4,5% dari seluruh perusahaan/usaha yang ada.

Pergeseran klasifikasi yang terjadi dari sudut pandang kelompok UMK maupun UMB diperlihatkan dalam Gambar 4.1. Sebanyak 41,8% perusahaan/usaha yang masuk dalam kelompok UMB mengalami pergeseran klasifikasi menjadi UMK. Ini menunjukkan bahwa kelompok perusahaan/usaha UMB sangatlah rentan: dalam waktu setahun sekitar 42 dari 100 perusahaan/usaha UMB mengalami penurunan omzet hingga masuk ke level UMK. Akan tetapi, dari sudut pandang yang berbeda, lain, kondisi ini dapat menggambarkan kualitas data yang *under estimate*. Keadaan yang sebaliknya terjadi untuk perusahaan/usaha dalam kelompok UMK: pergeseran hanya terjadi sebesar 0,55% saja dari seluruh perusahaan yang ada. Ini menunjukkan bahwa perusahaan/usaha dalam kelompok UMK cenderung stabil dan tidak mudah mengalami fluktuasi akibat perubahan perekonomian yang terjadi selama kurun waktu setahun. Kurang lebih 6 dari 1000 perusahaan/usaha UMK berhasil menaikkan “status”nya menjadi UMB. Akan tetapi, dari sudut pandang yang berbeda, pergeseran perusahaan/usaha dari kelompok UMK menjadi UMB bisa jadi menampakkan kualitas data yang *over estimate*.

Gambar 4.1 Pergeseran Klasifikasi Usaha yang Terjadi pada Kelompok UMB dan UMK



Hasil akhir dari proses *filtering* adalah data yang siap untuk diolah lebih lanjut dalam analisis. Data ini *valid* dari sisi kelengkapan maupun rasionalitasnya, serta berasal dari perusahaan/usaha yang tidak mengalami pergeseran klasifikasi. Selanjutnya perusahaan/usaha inilah yang menjadi unit analisis. Banyaknya perusahaan/usaha tersebut diperlihatkan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Banyaknya Unit Analisis Hasil Proses *Filtering*

Klasifikasi Usaha	Jumlah	Persentase
UMB	56.626	4,7%
UMK	1.157.648	95,3%
Jumlah	1.214.274	100,0%

4.4 Klasifikasi Usaha Menggunakan Metode Analisis *Cluster*

Metode analisis *cluster* digunakan untuk mengelompokkan data sedemikian sehingga data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama/berdekatan, sementara data antar kelompok memiliki karakteristik yang berbeda/berjauhan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hasil pengelompokan dengan metode analisis *cluster* dalam tulisan ini digunakan sebagai pembandingan untuk mengevaluasi pengklasifikasian yang telah ditetapkan dalam SE06-SS. Metode analisis *cluster* yang digunakan adalah *Twostep Cluster* dari SPSS yang dipilih antara lain karena kemampuannya mengakomodasi keberadaan variabel numerik dan variabel kategorik secara simultan di dalam modelnya. Selanjutnya dalam subbab ini akan dipaparkan hasil yang diperoleh setelah melakukan pengelompokan data menggunakan metode analisis *Twostep Cluster*.

4.4.1 Pemenuhan Asumsi dan Penyederhanaan Variabel

Metode analisis *Twostep Cluster* merupakan sebuah metode analisis statistik parametrik yang mengasumsikan bahwa variabel-variabel didalam prosedurnya memenuhi asumsi sebagai berikut:

- Variabel kontinyu/numerik memiliki sebaran normal

- Variabel kategorik memiliki sebaran multinomial
- Antar variabel saling independen

Akan tetapi panduan SPSS menjelaskan bahwa metode ini cukup *robust* meski asumsi-asumsi di atas tidak sepenuhnya terpenuhi⁷. Meski demikian, dalam tulisan ini tetap diupayakan untuk bisa memenuhi asumsi-asumsi tersebut.

Diantara pemenuhan asumsi tersebut, asumsi bahwa antar variabel saling independen lebih ditekankan dalam subbab ini karena terkait dengan penyederhanaan variabel yang akan digunakan dalam analisis. Untuk keperluan ini, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menghitung korelasi antar variabel seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Korelasi Antar Variabel-variabel Numerik *)

Variabel	Jumlah Tenaga Kerja	Balas Jasa Tenaga Kerja	Total Pendapatan/ Omzet	Total Biaya	Modal /Aset
Jumlah Tenaga Kerja	1				
Balas Jasa Tenaga Kerja	0,596	1			
Total Pendapatan/ Omzet	0,472	0,555	1		
Total Biaya	0,353	0,570	0,807	1	
Modal/Aset	0,138	0,307	0,192	0,204	1

Keterangan: *) Dihitung menggunakan korelasi *Pearson*. Masing-masing angka korelasi signifikan pada level 1%.

Dari tabel di atas dapat diketahui saling keterkaitan (korelasi) antar variabel. Angka positif dari besaran korelasi tersebut menunjukkan hubungan yang positif antar variabel yang bersangkutan. Dalam hal ini angka korelasi dianggap mempunyai pengaruh yang kuat bila besarnya melebihi 0,5.

Memperhatikan angka korelasi dalam Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa terdapat korelasi yang kuat antara:

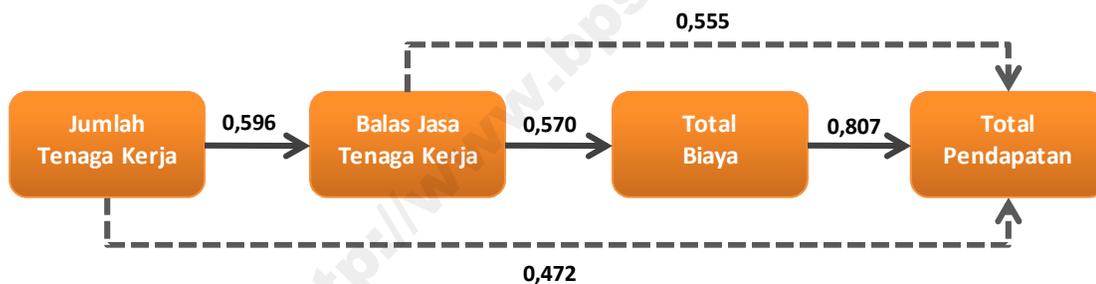
- Total Pendapatan dan Total Biaya,
- Balas Jasa Tenaga Kerja dengan Jumlah Tenaga Kerja,

⁷ Norusis, Marija, J. 2008. *SPSS 17.0 Statistical Procedures Companion*. New York: Prentice Hall.

- Balas Jasa Tenaga Kerja dengan Total Pendapatan, dan
- Balas Jasa Tenaga Kerja dengan Total Biaya.

Dari keempat hubungan antar pasangan variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan/usaha maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkannya. Sementara besarnya balas jasa tenaga kerja berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan/usaha tersebut. Selanjutnya karena balas jasa tenaga kerja merupakan komponen dari biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan/usaha, maka semakin besar balas jasa tenaga kerja yang dikeluarkan akan semakin memperbesar biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha tersebut. Korelasi antar variabel-variabel tersebut secara sederhana dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:

Gambar 4.2 Bagan Korelasi Antar Variabel



Banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh suatu perusahaan/usaha dengan demikian dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap total pendapatan yang akan diperolehnya. Akan tetapi dari angka korelasi yang diperlihatkan dalam Tabel 4.6 diketahui bahwa pengaruh secara langsung dari penyerapan tenaga kerja terhadap total pendapatan tidaklah begitu kuat.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan variabel Balas Jasa Tenaga Kerja dan Total Biaya akan dapat melanggar asumsi independensi antar variabel di dalam metode analisis *Twostep Cluster* yang akan digunakan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya dilakukan penyederhanaan dengan tidak mengikutsertakan kedua variabel

tersebut di dalam analisis. Dengan demikian variabel penelitian yang akan digunakan terdiri dari⁸:

- Jaringan Perusahaan (kategorik)
- Bentuk Badan Hukum (kategorik)
- Jumlah Tenaga Kerja (numerik)
- Pendapatan/omset (numerik)
- Modal/aset (numerik)

4.4.2 Hasil Pengelompokan

Dengan menggunakan kelima variabel seperti diuraikan dalam subbab sebelumnya, dilakukan pengelompokan menggunakan metode *Twostep Cluster* dengan jumlah *cluster* sebanyak 2 dan 4 *cluster* kemudian membandingkannya dengan klasifikasi definitif dari SE06-SS. Pengelompokan dengan dua *cluster* digunakan sebagai pembanding bagi kelompok UMK dan UMB, sementara pengelompokan dengan empat *cluster* digunakan sebagai pembanding bagi usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar. Tabulasi hasil pengelompokan ini diperlihatkan dalam Lampiran 2.

Hasil perbandingan antar kedua klasifikasi (klasifikasi hasil pengelompokan dengan metode *Twostep Cluster* dan klasifikasi yang digunakan dalam SE06-SS) menunjukkan bahwa pengelompokan dengan dua *cluster* memberikan hasil yang lebih baik daripada dengan empat *cluster*. Seperti diperlihatkan dalam Tabel 4.7, hampir semua perusahaan/usaha dalam kelompok UMB masuk ke dalam *cluster* 2. Sementara 90% perusahaan/usaha dalam kelompok UMK masuk ke dalam *cluster* 1. Secara keseluruhan, jika diasumsikan bahwa *cluster* 1 dan 2 masing-masing adalah representasi dari UMK dan UMB, hasil pengelompokan dengan metode analisis *cluster* dapat memetakan 90,4% perusahaan/usaha ke dalam klasifikasi yang tepat. Kesimpulan ini diperkuat dengan penghitungan statistik *Pearson Chi-Square* yang

⁸ Secara kebetulan variabel yang digunakan menjadi sama dengan variabel yang digunakan dalam pendataan SE06-SS.

menunjukkan adanya hubungan antar kedua klasifikasi tersebut⁹. Dengan kata lain, pengelompokan dengan dua *cluster* menghasilkan *output* (berupa *cluster* 1 dan *cluster* 2) yang cukup merepresentasikan klasifikasi usaha yang ditetapkan dalam SE06-SS (kelompok UMK dan UMB).

Dari uraian di atas dan mengaitkan dengan klasifikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan SE06-SS, pengelompokan perusahaan/usaha ke dalam dua klasifikasi usaha (UMK dan UMB) adalah lebih baik dibandingkan dengan menggunakan empat klasifikasi usaha (Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar). Hasil pengelompokan yang hampir identik dengan pengklasifikasian yang ditetapkan menunjukkan bahwa pendataan dengan menggunakan pendekatan dua kelompok UMK atau UMB seperti yang telah dilaksanakan dalam pendataan SE06-SS (dibandingkan dengan empat klasifikasi) lebih menjamin kekonsistenan datanya secara statistik¹⁰.

Tabel 4.7 Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan vs Klasifikasi SE06-SS

Hasil Pengelompokan	Klasifikasi SE06-SS		Jumlah
	UMK	UMB	
Cluster 1	1.040.833 89,9% <u>85,7%</u>	102 0,2% <u>9,6%</u>	1.040.935 85,7%
Cluster 2	116.815 10,1% <u>0,0%</u>	56.524 99,8% <u>4,7%</u>	173.339 14,3%
Jumlah	1.157.648 95,3%	56.626 4,7%	1.214.274 100,0%
Pearson Chi-Square: 355200 (df=1), asymp. sig = 0,0			

Keterangan: Angka persentase bercetak tebal dan bergaris bawah masing-masing menunjukkan persentase terhadap Jumlah Kolom dan terhadap Total.

⁹ Penghitungan statistic *Pearson Chi-Square* untuk tabulasi silang seperti pada Tabel 4.7 dapat digunakan antara lain untuk menguji independensi antar dua variabel kategorik. Angka *asym. sig.* sebesar 0,0% seperti tertera dalam tabel menunjukkan bahwa data yang ada sudah cukup memberikan bukti adanya keterkaitan antara kedua variabel.

¹⁰ Komposisi cluster berikut signifikansi dari masing-masing variabel diperlihatkan dalam Lampiran 3.

4.4.3 Karakteristik Data Hasil Pengelompokan

Karakteristik dari masing-masing *cluster* (1 dan 2) diperlihatkan dalam Tabel 4.8. Penyusunan karakteristik ke dalam tabulasi silang dalam tabel ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat karakteristik mana yang membedakan *cluster* 1 dengan *cluster* 2. Untuk variabel-variabel numerik, data yang ada dikategorikan menurut konsep definisi kelompok UMK dan UMB dalam SE06-SS.

Tabel 4.8 Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan Menurut Karakteristik

Jaringan Usaha	Badan Hukum	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Omzet (Milyar Rp)	Aset (Juta Rp)	Hasil Pengelompokan	
					Cluster 1	Cluster 2
Tunggal	Tidak Berbadan Hukum	< 20	< 1	<200	1.020.735	
				200+	18.132	
			1 +	< 200	533	1
		20+	< 1	< 200	708	
				200+	300	
			1 +	200+	67	
	Berbadan Hukum	< 20	< 1	< 200		88.311
				200+		21.108
			1 +	< 200		5.062
		20+	< 1	< 200		1.580
				200+		5.212
			1 +	< 200		270
Kantor Pusat/Induk/ Cabang/ Perwakilan/ Unit Pembantu	Tidak Berbadan Hukum	< 20	< 1	< 200		2.196
				200+		2.211
			1 +	200+		5
	Berbadan Hukum	< 20	1 +	< 200		509
				200+		4.962
			20+	< 1	< 200	
		200+				4.170
		1 +		< 200		175
				200+		5.763

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa perusahaan/usaha dalam *cluster* 1 adalah perusahaan/usaha tunggal (yang tidak mempunyai jaringan usaha) dan tidak mempunyai badan hukum. Perusahaan/usaha yang masuk dalam *cluster* 2 adalah perusahaan yang memiliki atau merupakan bagian dari suatu jaringan perusahaan dan memiliki status badan hukum. Dari tabel ini juga diketahui bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja, Omzet dan Aset tidaklah begitu menentukan dalam membedakan suatu perusahaan/usaha masuk ke dalam suatu *cluster* tertentu.

4.4.4 Perlukah Pembedaan Kategori Industri dan Non Industri?

Tabulasi seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 merupakan hasil pengelompokan data dengan tidak membedakan antara kategori Industri dan Non Industri. Sementara klasifikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan SE06-SS membedakan antara kedua kategori tersebut. Oleh karena itu dilakukan tabulasi silang dengan membedakan antara kategori Industri dan Non Industri. Tujuan pembentukan tabel ini adalah untuk mengetahui apakah pemisahan kedua kategori tersebut cukup penting untuk dilakukan. Tabel 4.9 memperlihatkan hasil tabulasi tersebut.

Dalam Tabel 4.9, pengelompokan dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda. Pada pendekatan pertama pengelompokan data dilakukan tanpa membedakan kategori Industri dan Non Industri. Sementara pada pendekatan kedua pengelompokan dilakukan masing-masing untuk data dengan kategori Industri dan Non Industri. Dari tabel ini diketahui bahwa pemisahan klasifikasi menurut kategori Industri dan Non Industri tidaklah perlu dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari proporsi (*pattern*) yang terdapat di dalam sel-sel pada tabel tersebut. Hasil pengelompokan dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut memberikan angka proporsi yang sama. Proporsi jumlah perusahaan/usaha yang masuk ke dalam cluster 1 dan 2 masing-masing berada di sekitar angka 86% dan 14% baik pada kategori usaha Industri maupun Non Industri.

Tabel 4.9 Jumlah Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan vs Kategori Usaha

Kategori Usaha	Hasil Pengelompokan #1		Hasil Pengelompokan #2		Jumlah
	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 1	Cluster 2	
Industri	173.125 86,82%	26.273 13,18%	173.126 86,82%	26.272 13,18%	199.398 100%
Non Industri	867.810 85,51%	147.066 14,49%	867.812 85,51%	147.064 14,49%	1.014.876 100%
Jumlah	1.040.935 85,72%	173.339 14,28%	1.040.938 85,73%	173.336 14,27%	1.214.274 100%

Keterangan:

- Hasil Pengelompokan #1 diperoleh setelah melakukan pengelompokan data tanpa membedakan kategori Industri dan Non Industri.
- Hasil Pengelompokan #2 diperoleh setelah melakukan pengelompokan data masing-masing untuk kategori Industri dan Non Industri.

Disamping itu, karakteristik dari masing-masing cluster untuk kedua kategori tersebut juga tidak menunjukkan perbedaan berarti. Dari Tabel 4.10 dapat terlihat bahwa karakteristik pembeda antara *cluster* 1 dan 2 adalah sama, baik untuk kategori Industri maupun Non Industri. Perusahaan/usaha dalam *cluster* 1 adalah perusahaan/usaha tunggal (yang tidak mempunyai jaringan usaha) dan tidak mempunyai badan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemisahan klasifikasi menurut kategori Industri dan Non Industri tidaklah perlu dilakukan.

Tabel 4.10 Karakteristik Perusahaan/Usaha Hasil Pengelompokan Menurut Kategori Usaha Industri dan Non Industri

Kategori Usaha	Jaringan Usaha	Badan Hukum	Cluster 1	Cluster 2
Industri	Tunggal	Tidak Berbadan Hukum	173.125	1
		Berbadan Hukum		14.725
	Bukan Perusahaan/ Usaha Tunggal	Tidak Berbadan Hukum		4.409
		Berbadan Hukum		7.138
Non Industri	Tunggal	Tidak Berbadan Hukum	867.810	
		Berbadan Hukum		135.730
	Bukan Perusahaan/ Usaha Tunggal	Tidak Berbadan Hukum		3
		Berbadan Hukum		11.333

BAB 5

Kesimpulan

<http://www.kelompok.com>

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

BAB V

KESIMPULAN

Dengan melalui proses pengecekan dan reklasifikasi data SE06-SS, diketahui bahwa perusahaan/usaha dalam kelompok UMB lebih rentan terhadap perubahan ekonomi yang terjadi. Selama kurun waktu setahun, terhitung mulai waktu pencacahan (*listing*) sampai pendataan (survei lanjutan) Sensus Ekonomi 2006, sebanyak 42 dari 100 perusahaan/usaha dalam kelompok UMB secara konsep mengalami pergeseran klasifikasi menjadi UMK. Dari sudut pandang yang berbeda, pergeseran klasifikasi ini menampakkan kualitas data UMB yang *under estimate*. Sementara perusahaan/usaha dalam kelompok UMK relatif lebih tahan menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi bahkan sebagian diantaranya mampu bersaing dan menunjukkan keberhasilannya mengatasi perubahan ekonomi yang terjadi. Kurang lebih 6 dari 1000 perusahaan/usaha UMK berhasil menaikkan “status”nya menjadi UMB. Akan tetapi, dari sudut pandang yang berbeda, pergeseran perusahaan/usaha dalam kelompok UMK menjadi UMB bisa jadi menampakkan kualitas data yang *over estimate*.

Dengan menggunakan metode analisis *cluster* dan mengaitkan dengan pengklasifikasian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SE06-SS, pengelompokan perusahaan/usaha ke dalam dua klasifikasi usaha (UMK dan UMB) adalah lebih baik dibandingkan dengan empat klasifikasi usaha (Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar). Hasil analisis menunjukkan bahwa pendataan dengan menggunakan pendekatan dua kelompok UMK atau UMB seperti yang telah dilaksanakan dalam pendataan SE06-SS lebih menjamin kekonsistenan datanya secara statistik.

Metode analisis *twostep cluster* yang digunakan dalam tulisan ini dapat memetakan 90,4% perusahaan/usaha ke dalam klasifikasi yang tepat. Dalam hal ini kelompok UMK dan UMB masing-masing terpetakan ke dalam *cluster* 1 dan 2 hasil pengelompokan. Dengan menggunakan metode analisis ini, perusahaan/usaha yang

tergabung dalam kelompok UMK dapat diidentifikasi sebagai perusahaan/usaha tunggal (yang tidak memiliki jaringan usaha) dan tidak memiliki ijin usaha/badan hukum. Sementara perusahaan/usaha UMB dapat diidentifikasi sebagai perusahaan/usaha yang memiliki jaringan dan berbadan hukum. Disamping itu pengidentifikasian suatu perusahaan/usaha ke dalam kelompok usaha UMK atau UMB berdasarkan metode analisis ini tidak memerlukan lagi pembedaan antara perusahaan/usaha dengan kategori Industri atau Non Industri.

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Griffin, G. & Ebert, R., (1996), *Business* (4th edn), Prentice-Hall International, New Jersey.
- Hashim, M.K. & Wafa, S.A. 2002. *Small & Medium Sized Enterprises in Malaysia Development Issues*, Prentice Hall, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Hisrich Robert D., Michael P. Peters, 1998, *Entrepreneurship*, New York, Irwin Mc Graw-Hill
- http://www1.uni-hamburg.de/RRZ/Software/SPSS/Algorith.120/twostep_cluster.pdf
- Meredith, Geoffrey G. et al, 2002, *Kewirausahaan : Teori dan Praktek*, penerjemah : Andre Asparsayogi, Jakarta, Lembaga Manajemen PPM dan PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Mitzerg (Strategi Managemen, New York, 1992) serta Musselman dan Hughes (Introduction to Modern Business, 1992) dikutip oleh Sutojo dkk, *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Manajemen FE-UI, 1994, hal. 2&9.
- Norusis, Marija, J. 2008. *SPSS 17.0 Statistical Procedures Companion*. New York: Prentice Hall.
- Riyanti, BDP, 2003, *Kewirausahaan dari sudut pandang Psikologi Kepribadian*, Grasindo, Jakarta.
- Stevenson H 1999, "A Perspective On Entrepreneurship." Harvard Business School Working Paper #9-384-131
- Wheelen, T.L. and J. David Hunger, 2002. *Strategic Management and Business Policy*. Eighth Edition, New Jersey: Prentice-Hall.
- Zimmerer, TW dan Scarborough, NM, 1998, *Essential of entrepreneur and Small Business Management* 2th Prentice Hall.

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

LAMPIRAN

<http://www.b...id>

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong

LAMPIRAN 1

Daftar Kuesioner SE06-SS

Jenis Kuesioner	Kegunaan
SE06-UMK	
SE06-UMK PRODUKSI	Pendataan perusahaan/usaha UMK dengan kategori: C,D,E,F
SE06-UMK DISTRIBUSI	Pendataan perusahaan/usaha UMK dengan kategori: G, H, I
SE06-UMK JASA-JASA	Pendataan perusahaan/usaha UMK dengan kategori: J, K, M, N, O,
SE06-UMB Baru	
SE06-UMB-E2	Pendataan UMB Ketenagalistrikan
SE06-UMB-G	Pendataan UMB Perdagangan Besar dan Eceran
SE06-UMB-H2	Pendataan UMB Restoran/Rumahmakan, Bar, & Jasa Boga
SE06-UMB-I1	Pendataan UMB Transportasi
SE06-UMB-I2	Pendataan UMB Jasa Penunjang dan Pelengkap Angkutan
SE06-UMB-I3	Pendataan UMB Komunikasi di luar PT Pos dan Telkom
SE06-UMB-I4	Pendataan UMB Jasa Perjalanan Pariwisata
SE06-UMB-K1	Pendataan UMB Real Estate
SE06-UMB-K2	Pendataan UMB Jasa Persewaan
SE06-UMB-K3	Pendataan UMB Jasa Komputer
SE06-UMB-K4	Pendataan UMB Jasa Perusahaan Lainnya
SE06-UMB-M1	Pendataan UMB Jasa Pendidikan Dasar dan Menengah
SE06-UMB-M2	Pendataan UMB Jasa Pendidikan Tinggi
SE06-UMB-N	Pendataan UMB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
SE06-UMB-O	Pendataan UMB Jasa Kebersihan dan Kegiatan Lainnya
SE06-UMB-OK	Pendataan UMB Kawasan Pariwisata, Rekreasi, Kebudayaan dan
Kuesioner SE06-UMB Berkala	
SE06-UMB-C1	Pendataan UMB Unit Eksplorasi dan Produksi Minyak & Gas Bumi
SE06-UMB-C2	Pendataan UMB Unit Eksplorasi dan Produksi Non Migas
SE06-UMB-C3	Pendataan UMB Perusahaan Pengilangan
SE06-UMB-C4	Pendataan UMB UPPDN/Cabang/Depot/DPPU
SE06-UMB-C5	Pendataan UMB Kantor Pusat Pertambangan
SE06-UMB-C6	Pendataan UMB Perusahaan Penggalian
SE06-UMB-D	Pendataan UMB Perusahaan Industri Besar/Sedang
SE06-UMB-E1	Pendataan UMB Perusahaan Listrik Negara (PLN)
SE06-UMB-E3	Pendataan UMB Perusahaan Gas Negara
SE06-UMB-E4	Pendataan UMB Perusahaan Air Bersih
SE06-UMB-F	Pendataan UMB Perusahaan Konstruksi
SE06-UMB-H1	Pendataan UMB Perusahaan Hotel dan Akomodasi Lainnya
SE06-UMB-J1.1	Pendataan UMB Perusahaan Perbankan Konvensional
SE06-UMB-J1.2	Pendataan UMB Perusahaan Perbankan Syariah
SE06-UMB-J2	Pendataan UMB Perusahaan Usaha Pembiayaan
SE06-UMB-J3	Pendataan UMB Perusahaan Pasar Modal

Jenis Kuesioner	Kegunaan
SE06-UMB-J4	Pendataan UMB Perusahaan Asuransi dan Jasa Penunjangnya
SE06-UMB-J5	Pendataan UMB Perusahaan Dana Pensiun
SE06-UMB-J6	Pendataan UMB Perusahaan Pegadaian
SE06-UMB-J7	Pendataan UMB Perusahaan Perdagangan Valuta Asing
SE06-UMB-J8	Pendataan UMB Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam
SE06-UMB Khusus	
SE06-UMB-I5	Pendataan Perusahaan Angkutan Jalan Rel
SE06-UMB-I6	Pendataan Perusahaan Angkutan Sungai Danau dan
SE06-UMB-I7	Pendataan Perusahaan Angkutan Udara
SE06-UMB-I8	Pendataan Perusahaan Jasa Jalan Tol
SE06-UMB-I9	Pendataan Perusahaan Jasa Pelayanan Kepelabuhan Laut
SE06-UMB-I10	Pendataan Perusahaan Jasa Kebandarudaraan
SE06-UMB-I11	Pendataan Perusahaan Pos Nasional
SE06-UMB-I12	Pendataan Perusahaan Jaringan Telekomunikasi
SE06-UMB-I13	Pendataan Perusahaan Jasa Telekomunikasi

LAMPIRAN 2

Tabulasi hasil *clustering* dan perbandingan dengan klasifikasi SE06-SS

A. Pengelompokan dengan 2 Cluster

Hasil Pengelompokan	Klasifikasi SE06-SS		Jumlah
	UMK	UMB	
Cluster 1	1.040.833 85,7%	102 0,0%	1.040.935 85,7%
Cluster 2	116.815 9,6%	56.524 4,7%	173.339 14,3%
Jumlah	1.157.648 95,3%	56.626 4,7%	1.214.274 100,0%

Overall mismatch: 9,6%

B. Pengelompokan dengan 4 Cluster

Hasil Pengelompokan	Klasifikasi SE06-SS				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
Cluster 1	777.652 64,0%	263.182 21,7%	90 0,0%	12 0,0%	1.040.936 85,7%
Cluster 2	32.754 2,7%	22.176 1,8%	27.773 2,3%	16.999 1,4%	99.702 8,2%
Cluster 3	29.126 2,4%	32.754 2,7%	7.082 0,6%	2.662 0,2%	71.624 5,9%
Cluster 4	0 0,0%	4 0,0%	44 0,0%	1.964 0,2%	2.012 0,2%
Jumlah	839.532 69,1%	318.116 26,2%	34.989 2,9%	21.637 1,8%	1.214.274 100,0%

Overall mismatch: 33,4%

LAMPIRAN 3A

Komposisi data dalam pengelompokan dengan 2 Cluster

Variabel Numerik

Variabel	Statistik	Centroids	
		Cluster 1	Cluster 2
Jumlah Tenaga Kerja	Mean	1,91	26,33
	Std. Dev.	2,214	213,362
Total Pendapatan	Mean	55.000.000	7.900.000.000
	Std. Dev.	226.200.000	134.600.000.000
Modal/Aset	Mean	26.200.000	21.800.000.000
	Std. Dev.	445.900.000	917.500.000.000

Variabel Kategorik

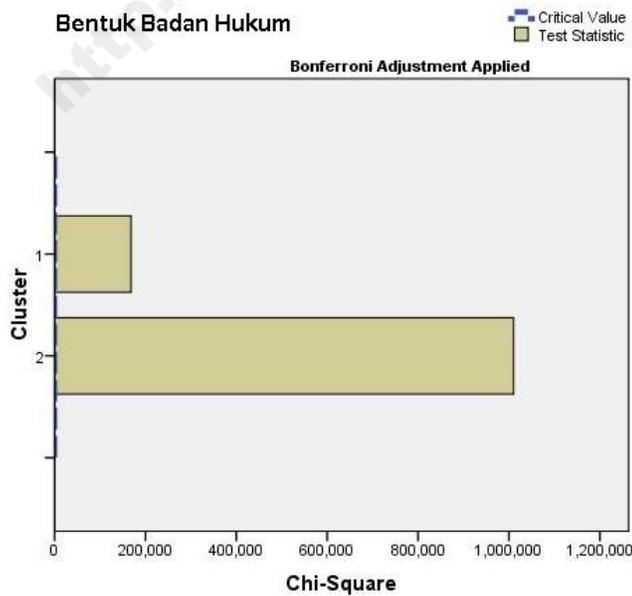
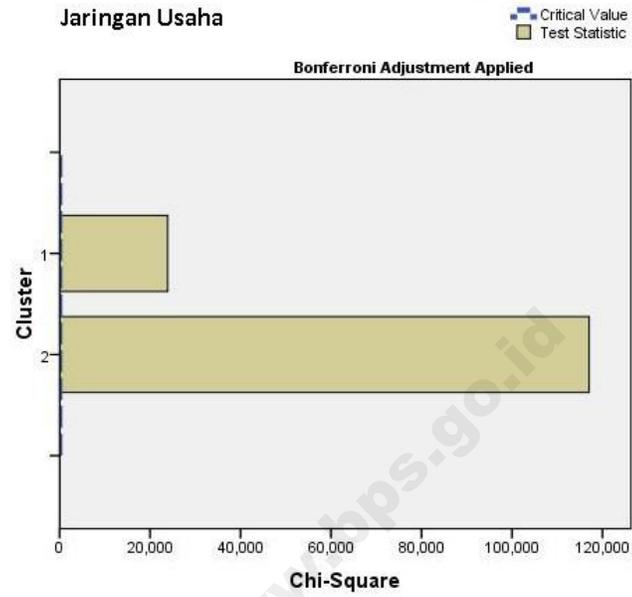
Jaringan Usaha	Cluster 1	Cluster 2
Tunggal	87,40%	12,60%
Kantor pusat/ induk	0,00%	100,00%
Cabang	0,00%	100,00%
Perwakilan	0,00%	100,00%
Unit pembantu	0,00%	100,00%

Bentuk Badan Hukum	Cluster 1	Cluster 2
Perorangan/ Tdk	99,60%	0,40%
PT/PT(Persero)/	0,00%	100,00%
Koperasi	0,00%	100,00%
CV	0,00%	100,00%
Firma	0,00%	100,00%
BHMN	0,00%	100,00%
Yayasan	0,00%	100,00%
Perwakilan	0,00%	100,00%
Ijin/ijin khusus dari	0,00%	100,00%
Badan Hukum Lainnya	0,00%	100,00%

LAMPIRAN 3B

Signifikansi variabel dalam pengelompokan dengan 2 Cluster

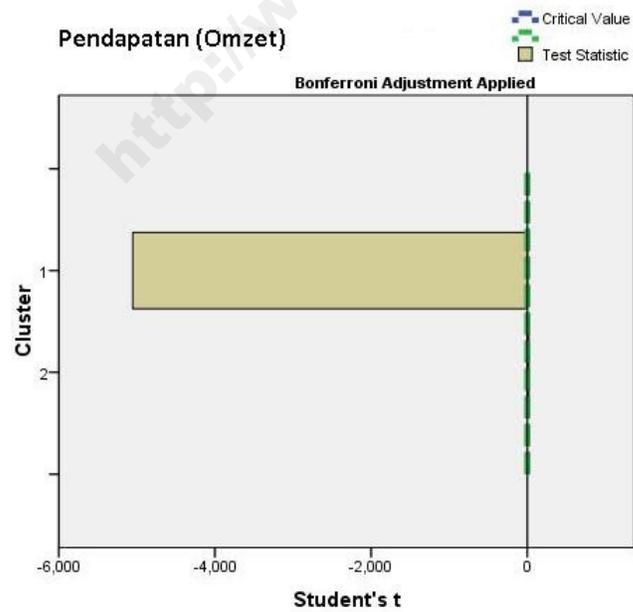
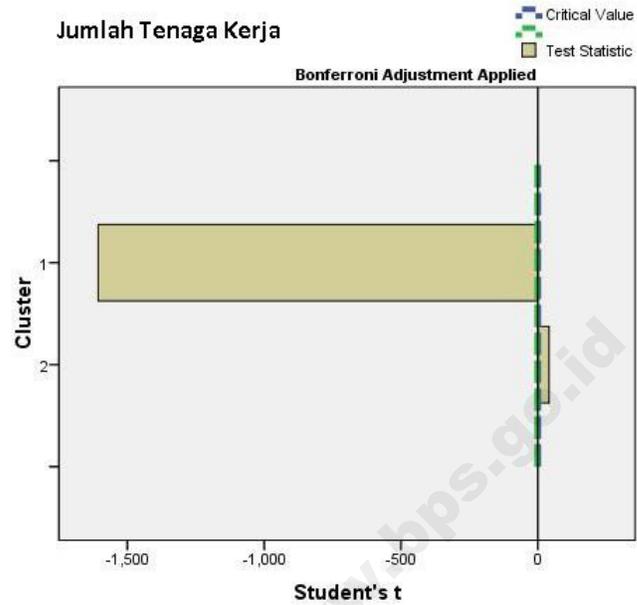
Variabel Kategorik



LAMPIRAN 3B

Signifikansi variabel dalam pengelompokan dengan 2 Cluster

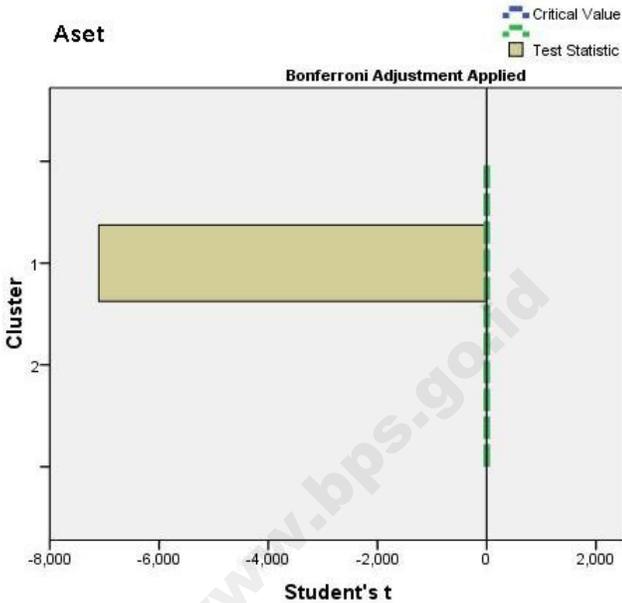
Variabel Numerik



LAMPIRAN 3B

Signifikansi variabel dalam pengelompokan dengan 2 Cluster

Variabel Numerik



<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710. Kotak Pos 1003 Jakarta 10010

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4. Fax: (021) 3857046.

Homepage: <http://www.bps.go.id>. e-mail: bpsdq@bps.go.id